



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

DOKUMEN KURIKULUM

Program Studi (S2)

**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
(MIP)**

**DENGAN PENDEKATAN *OUTCOME-
BASED EDUCATION (OBE)***



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO**

2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: untadfisip18@gmail.com Laman: <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 2783/UN28.3/DT.00.00/2024
Lampiran : Dokumen Kurikulum
Perihal : Pengajuan Penetapan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu pemerintahan

KepadaYth

Dekan Fisip Untad

Di -

T e m p a t

Terkait dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor : 456/E/O/2024 tentang izin pembukaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister Pada Universitas Tadulako Di Kota Palu. maka untuk mendukung penyelenggaraan program studi tersebut disampaikan dokumen Kurikulum Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, maka dimintakan untuk adanya rekomendasi penetapan kurikulum kepada Senat Fisip Untad untuk dapat digunakan dalam dokumen dan naskah resmi Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Palu, 29 Agustus 2024

Koordinator Prodi

Ilmu Pemerintahan

Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP.,M.Si

NIP. 197503202666041002

Tembusan; Kepada Yth.

1. Ketua Senat Fisip Untad
2. Petinggal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 6648/UN28/HK.03/2024

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME - BASED EDUCATION (OBE)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER (S2)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako melalui surat nomor 2959/UN28.3/DT.00.00/2024 tanggal 9 September 2024 mengusulkan penetapan Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;
 - bahwa Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) berfokus pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berorientasi pada masa depan. Nilai utama dalam kurikulum ini berdasarkan pada konsep pembelajaran mandiri, kreatif, fleksibel, dan inovatif bagi mahasiswa, diharapkan dapat mewujudkan visi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka perlu menerapkan Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME-BASED EDUCATION* (OBE) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER (S2) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU : Kurikulum Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako ditetapkan dalam bentuk Buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,


 Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
 NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.

Daftar MK di Semester III
Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			Jumlah
			Teori	Praktikum*	Praktik**	
1.	B08242018	Publikasi Jurnal	2	0	2	4
2.	B08242019	Seminar Ilmiah	2	0	2	4
3.	B08242020	Thesis/ Karya Tulis akhir	2	0	4	6
Jumlah Beban Studi Semester III						14

*Praktikum mengacu pada pembelajaran MK di Laboratorium/Studio

**Praktik mengacu pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan (satuan pendidikan, instansi, perusahaan, industri, atau dunia usaha yang relevan)

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.,
NIP. 196807141994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 6648/UN28/HK.03/2024
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024
 TENTANG PENETAPAN BUKU KURIKULUM BERBASIS
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM
 STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER
 (S2) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS TADULAKO

Daftar MK di Semester I

Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			Jumlah
			Teori	Praktikum*	Praktik**	
1.	B08242001	Filsafat & Metode Ilmu Pemerintahan	2	0	1	3
2.	B08242002	Metodologi ilmu pemerintahan	3	0	0	3
3.	B08242003	Teori-Teori Sosial	3	0	0	3
4.	B08242004	Teori-Teori Ilmu Pemerintahan	3	0	0	3
5.	B08242005	Ekonomi Politik	2	0	1	3
6.	B08242006	Konstitusi Pemerintahan	2	0	1	3
7.	B08242007	Seminar Pemerintahan	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester I						20

Daftar MK di Semester II

Semester II

No	Kode MK	Mata Kullah (MK)	Bobot SKS			Jumlah
			Teori	Praktikum*	Praktik**	
1.	B08242008	Demokrasi dan Pemerintahan	2	0	1	3
2.	B08242009	Etika & Moral Pemerintahan	2	0	1	3
3.	B08242010	Tata Kelola Sektor Publik	2	0	1	3
4.	B08242011	ICT Politik & Governance	2	0	1	3
5.	B08242012	Tata Kelola Bencana	2	0	1	3
6.	B08242013	Ujian proposal	2	0	0	2
7.	B08242014- B08242017	Pilihan	2	0	1	3
Jumlah Beban Studi Semester II						20



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



UNTAD KLIK: One for All All for One

DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI (S2)
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
(M.IP)
DENGAN PENDEKATAN
OUTCOME-BASED EDUCATION(OBE)



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO
2024



DOKUMEN KURIKULUM

PROGRAM STUDI (S2)

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN(M.IP)

DENGAN PENDEKATAN

OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

etua : Dr. Muhammad Nur Alamsyah, S.IP, M.Si

Sekretaris : La Husen Zuada, S.IP, M.IP

Anggota Tim :

Dr. Darwis, M.Si

Dr. H. Irwan Waris, M.Si

Dr. Muh. Nawawi, M.Si

Dr. Isbon Pageno, M.Si

Dr. Hasanuddin Mustari, M.Si

Dr. H. Sasterio, M.Si

Dr. Nurhannis, M.Si

Dr. Muhammad Arief, S.IP, M.Si

Dr. Mahfuzat, S.Ip, M.Si

Sulfitri Husain, S.IP, MA

Sisrilhardi, S.IP, MA

Angga Pradana, S.IP, MA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TADULAKO

2024

SK REKTOR

(Pemberlakuan Kurikulum dengan Pendekatan OBE Program Studi)

DAFTAR ISI

Sampul Dokumen Kurikulum PS	i
Halaman Tim Penyusun Kurikulum PS	ii
SK Rektor	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	v
1. Identitas Program Studi	1
2. Evaluasi Kurikulum, <i>Tracer Study</i> , dan Proses Penyusunan Kurikulum PS	2
2.1 Hasil Evaluasi Kurikulum PS	2
2.2 Hasil <i>Tracer Study</i>	2
2.3 Proses Penyusunan Kurikulum PS	2
3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum PS	3
3.1 Landasan Filosofis	3
3.2 Landasan Sosiologis	3
3.3 Landasan Historis	3
3.4 Landasan Psikologis	3
3.5 Landasan Yuridis (Hukum)	3
4. Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, Strategi Program Studi, dan <i>University Value</i>	5
4.1 Visi Keilmuan PS	5
4.2 Misi PS	5
4.3 Tujuan PS	5
4.4 Strategi PS	5
4.5 <i>University Value</i>	5
5. Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	6
5.1 Profil Lulusan (PL)	6
5.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	6
5.3 Matriks Hubungan CPL dan PL	7
6. Penetapan Bahan Kajian	8
6.1 Deskripsi <i>Body of Knowledge</i> (BoK)	8
6.2 Deskripsi Bahan Kajian (BK)	8
7. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS	9
7.1 Matriks CPL dan Pembentukan MK	9

7.2 Daftar MK, CPL, BK, dan Materi Pembelajaran	11
8. Struktur Mata Kuliah Program Studi	12
8.1 Matriks Kuriulum	12
8.2 Masa Tempuh Kurikulum	12
9. Daftar Sebaran Mata Kuliah Setiap Semester	13
10. Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran	14
11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	15
12. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum PS	29
13. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Berbagai Tahapan Kurikulum PS	30
Penutup	31
Lampiran	

14. Struktur Mata Kuliah Program Studi	16
15. Daftar Sebaran Mata Kuliah Setiap Semester	17
16. Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran	18
17. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	19
12. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum PS	29
13. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa pada Berbagai Tahapan Kurikulum PS	30
14. Penutup	31
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan Dokumen Kurikulum S2 Magister Ilmu Pemerintahan berbasis Outcome Based Education (OBE). keberadaan dokumen Kurikulum ini diharapkan akan dapat menjadi kerangka penyelenggaraan proses pembelajaran pada program studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan sehingga dapat melakukan percepatan lulusan dan memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki kualifikasi dengan memilih model pembelajaran dan kompetensi yang diinginkan.

Melalui panduan ini diharapkan Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan akan dapat mengembangkan program pembelajaran secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Program Studi, dosen, mahasiswa, mitra, dan pihak terkait lainnya terutama dunia usaha dan investasi (DUDI).

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan menggunakan Kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Education) ini dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum merupakan suatu panduan bagi proses pembelajaran yang dipersiapkan berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Diharapkan dengan adanya Panduan Perancangan Kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Education) ini, seluruh civitas akademika di lingkungan Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD, stakeholder, mitra, pengguna dapat bersinergi dan berintegrasi dalam proses pembelajaran yang efektif, efisien dalam mencapai sasaran, target dan tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan pasar.

Palu, 21 Agustus 2024

I. IDENTITAS PROGRAM STUDI

Perguruan Tinggi	: Universitas Tadulako
Fakultas/Pascasarjana	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: S2- Magister Ilmu Pemerintahan
Status Akreditasi	:
Jumlah Mahasiswa	:
Jumlah Dosen	: 5
Alamat PS	: Jl. Sukarno-Hatta, Km. 09 Untad Palu, komp. Kampus untad Tondo
Email PS	:
Telp/Web PS	:
Gelar Lulusan	: Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)

II. EVALUASI KURIKULUM, *TRACER STUDY*, DAN PROSES PENYUSUNAN KURIKULUM PS

2.1 Evaluasi Kurikulum PS

Analisis kebutuhan pasar dapat dilihat dalam dua hal; yaitu terkait dengan: 1) Potensi calon mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad. Program Studi magister Ilmu Pemerintahan memiliki potensi calon mahasiswa yang sangat besar, peluang untuk meraih minat calon mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan sangat terbuka luas, hal ini disebabkan karena saat ini banyak terdapat program studi sarjana Ilmu Pemerintahan di hampir semua Universitas, khususnya berdiri dikampus-kampus di wilayah Sulawesi seperti lulusan S-1 Ilmu Pemerintahan Untad, S-1 Ilmu Pemerintahan Unismuh Luwuk, S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Tompotika (Luwuk), S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Madako (Toli-Toli), S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo, S- 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, dan S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Manado). Selain itu juga potensi calon mahasiswa yang berasal dari birokrat, anggota legislatif, staf ahli DPRD yang bertugas di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, serta 3 Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yang berdekatan akses dengan Palu, yaitu Kabupaten Pasang Kayu, Mamuju Tengah dan Mamuju.

2) Potensi Lulusan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad berdasarkan analisis kebutuhan pasar. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan memiliki prospek yang bagus bagi para lulusannya untuk berkiprah di beberapa bidang pekerjaan atau profesi yang sangat dibutuhkan baik di tingkat pemerintahan maupun kemasyarakatan. Berdasarkan analisis kebutuhan pasar, setidaknya peluang lulusan Magister Ilmu Pemerintahan dapat memenuhi bidang-bidang profesi sebagai berikut:

- a. Aparat Pemerintah: lulusan Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad akan sangat dibutuhkan dalam dunia pemerintahan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Keahlian yang melekat pada lulusan Magister Ilmu Pemerintahan diantaranya analisis kebijakan, mengatur jalannya/ penyelenggaraan pemerintahan, serta menyediakan solusi bagi permasalahan masyarakat.
- b. Anggota Legislatif Daerah (DPRD), calon mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan juga dapat diisi dari para anggota legislatif daerah (DPRD).
- c. Anggota dan Pengurus Partai Politik. Salah satu prospek kerja bagi lulusan Magister Ilmu Pemerintahan dengan menjadi anggota ataupun aktivis di Dalam suatu partai politik.

d. Peneliti. Menjadi Peneliti dan asisten peneliti juga salah satu peluang prospek bagi lulusan Magister Ilmu pemerintahan.

e. Aktivist LSM/ Organisasi Masyarakat. Lulusan Magister Ilmu Pemerintahan yang dibekali bagaimana menjadikan masyarakat menjadi ideal dengan suatu kebijakan yang efektif, dirasa tepat untuk mengisi LSM ataupun organisasi masyarakat secara aktif dan produktif. Produktivitas lulusan Magister Ilmu pemerintahan di dalamnya dapat membawa lulusan tersebut menjadiseorang aktivis.

f. Jurnalis Pemerintahan / Politik. Jurnalis yang bertugas dalam meliput berbagai berita dan fenomena mengenai politik dan pemerintahan, merupakan prospek kerja yang menjanjikan bagi lulusan Magister Ilmu Pemerintahan. Pekerjaan ini sangat tepat karena selain pintar menganalisis, lulusan Ilmu Pemerintahan juga pasti telah menguasai materi – materi dasar dari fenomena politik ataupun fenomena pemerintahan yang diliputnya.

g. Konsultan Pemerintahan / Kebijakan. Menjadi konsultan pemerintahan, tentu sangat tepat bila menjadi prospek kerja yang menjanjikan bagi lulusan Ilmu pemerintahan. Karenanya menjadi konsultan sangat membutuhkan strategi – strategi dan pemikiran yang brilian untuk membangun pemerintahan yang baik, yang tentunya harus dilandasi dengan pengetahuan dan teori – teori mengenai pemerintahan. Maka dari itu, menjadi konsultan pemerintahan adalah salah satu prospek kerja yang paling diincar oleh para lulusan Ilmu Pemerintahan.

h. Tenaga Pendidik/Akademisi/Dosen. Mempelajari dengan detail dan menyeluruh mengenai ilmu pemerintahan, tentu menjadikan lulusan Ilmu Pemerintahan sangat menguasai seluk beluk dunia pemerintahan baik dari segi teori maupun praktis. Dengan adanya kedalaman pengetahuan atas keilmuan yang dipelajari ini, menjadi dosen ataupun tenaga pendidik dalam bidang ilmu pemerintahan pun juga menjadi prospek kerja dari lulusan Ilmu Pemerintahan. Melakukan transfer ilmu pada orang lain mengenai pemerintahan dan bertujuan untuk membangunnya secara bersama – sama, merupakan salah satu tugas mulia dari profesi dosen Ilmu Pemerintahan yang dinilai cukup menjanjikan ini.

Pembandingan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dengan Program Studi sejenis dilakukan dengan membandingkan kurikulum dan capaian pembelajaran prodi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini kurikulum MIP pada empat Universitas tersebut telah diakses melalui jaringan KAPSIPI, namun untuk pendalaman kurikulum akan dilakukan melalui kunjungan lembaga yang direncanakan dalam waktu paling lama enam bulan kedepan.

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program studi. Salah satu untuk dapat merumuskan capaian pembelajaran terlebih dahulu harus dirumuskan kekhasan program studi. Selain itu, rumusan kekhasan kajian yang dikembangkan program studi dapat menjadi kekuatan dan keunggulan program studi. Berdasarkan perkembangan *state of the art* bidang Ilmu Pemerintahan dan rumusan kurikulum yang dikembangkan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad, maka dirumuskan kekhasan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad yaitu pada “**Disaster Governance (Tata Kelola Kedaruratan Bencana)**”.

2.2 Tracer Study

Pembukaan Program Studi Magister (S)2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Tadulako merupakan respon terhadap perkembangan global, nasional, regional dan lokal terutama kaitannya dengan perkembangan dinamika sosial, ekonomi dan politik serta fenomena kebencanaan baik alam maupun non alam sebagai fenomena empirik lingkungan dan masyarakat saat ini. Perkembangan global termasuk adanya kebangkitan daerah dengan berkembangnya industri pertambangan dan pengolahan mineral terutama nikel dan emas serta majunya perkebunan pertanian di Sulawesi Tengah serta dinamika politik pasca penetapan Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan di Kalimantan Timur. Fenomena ini membutuhkan adanya cara pandang baru dalam pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi.

Karakteristik yang menjadi Kekhasan utama program studi ini adalah fokus pada pengelolaan tata kelola pemerintahan dengan *stakeholders* pada berbagai pemangku kepentingan terkait industri tambang dan pengelolaan mineral yang berbasis pada pengelolaan pemerintahan yang adaptif terhadap *disaster* (alam/non alam) *governance* yang smart dengan optimalisasi fungsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, internet of things (IoT) dan *big data* analisis dengan tidak melupakan local wisdom yang ada.

Respon selanjutnya secara khusus menjawab tuntutan kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas terutama mencermati situasi dan kondisi di wilayah Sulawesi Tengah. Jika merujuk pada kondisi aktual

tersebut, dalam beberapa tahun terakhir maka terdapat dua sisi penting yang menjadi perhatian para ilmuwan Pemerintahan. **Pertama**, Sulawesi Tengah dalam perkembangan industri tersebut membutuhkan analisis kebijakan pemerintahan yang dapat adaptif dengan kebutuhan komunitas, investasi, hubungan dengan media, hubungan dengan pemerintah yang kerap mengalami kendala karena lemahnya pengelolaan kebijakan. **Kedua**, Sulawesi Tengah secara umum adalah daerah yang rawan bencana alam, terutama gempa bumi, gunung berapi, likuifaksi, tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu disinilah peran penting ilmu pemerintahan dengan prinsip disaster governance dalam konteks mitigasi, sosialisasi kerentanan dan upaya membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana. Merespon hal tersebut, Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako akan mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kajian Disaster Governance yang mampu melahirkan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dan kapasitas kebijakan adaptif dan win-win solution terhadap fenomena kebencanaan baik alam maupun non alam yang dihadapi selain melahirkan tenaga Pemberdayaan Masyarakat yang mampu menginovasi perubahan yang ada. Pemerintahan berbasis Lingkungan dan Resiliensi Bencana serta kompetensi pengelolaan konflik dalam Perubahan Sosial Masyarakat industri baru yang dinamis. Prodi Magister Ilmu Pemerintahan ini akan fokus pada kajian tata kelola kebencanaan sebagai kekhasan atau penciiri dibandingkan PS sejenis seperti pada Universitas Hasanuddin Sebagai satu-satunya PS Magister Ilmu Pemerintahan di Sulawesi. Hal ini juga berbeda dengan kekhasan yang dimiliki Program studi Magister (s2) Ilmu Pemerintahan di Univ. Mulawarman ataupun di Prodi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) serta perguruan tinggi di Malaysia, Australia dan Amerika Serikat.

Tabel. Perbandingan Keunggulan Program Studi (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako dengan Program Studi (S2) ilmu pemerintahan dalam Negeri

Komponen Keunggulan	UNHAS	Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	UNMUL	UNTAD
Pengembangan Keilmuan	Berorientasi pada pengembangan ilmu dan tata kelola pemerintahan berbasis benua maritim	Keilmuan berorientasi pada pengkajian pengembangan keilmuan berbasis	Pengembangan tata Kelola Pemerintahan berbasis Ibu Kota Negara, Politik dan Kebijakan Sumber	Berorientasi pada pengembangan keilmuan pemerintahan untuk mewujudkan Tata

		pengelolaan konflik yang terjadi dalam hubungan antar stakeholders	Daya Alam melalui proses akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diakui secara Nasional, Regional dan Internasional	Kelola Pemerintahan dengan optimalisasi IT dalam penanganan dampak kebencanaan alam maupun non alam.
Kajian Capaian Pembelajaran	Mahasiswa memiliki kompetensi teoritis dan praktis yang mampu melakukan penelitian, pendidikan dan pengabdian dalam tata kelola pemerintahan benua maritim serta mampu berkontribusi dalam desain kebijakan pemerintah untuk pembangunan benua maritim.	Mahasiswa S2 MIP UMY menjadi kompeten dalam knowledge, analytical skill dan attitude yang dibekali dengan advance knowledge tentang sistem pemerintahan, reformasi birokrasi, kelembagaan pemerintahan, budgeting sistem, policy making analysis, system kepartaian, local government, dan dynamic governance.	Mahasiswa memiliki kompetensi secara kognitif, afektif dan psikomotorik dengan mengembangkan penelitian dasar dan terapan yang inovatif dalam kajian otonomi daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis, Membangun jaringan dan kerja sama pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional .	Mahasiswa akan mampu memiliki kompetensi teoritis dan keahlian praktis di bidang keilmuan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan kompetensi utama terkait penatakelolaan pemerintahan dalam mengelola dampak kebencanaan baik alam maupun non alam (disaster governance)
Kurikulum	Dirancang dalam 42 SKS yang ditempuh melalui sistem paket untuk 3 semester	Kurikulum dirancang dalam 3 Semester dengan beban studi 36 SKS yang dapat ditempuh melalui joint degree maupun fast track.	Kurikulum dirancang dalam 3 Semester dengan beban studi 36 SKS (wajib dan Pilihan)	Kurikulum S2 Ilmu Pemerintahan ditentukan Kesatuan program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) Thn 2023. Melalui penyelesaian 36 SKS yang ditempuh dalam 3-4 semester.

Tabel. Perbandingan Keunggulan Program Studi (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako dengan Program Studi (S2) ilmu pemerintahan di Luar Negeri

Komponen Keunggulan	Graduate Certificate in Collaborative Governance. The School of Government and Public Policy, College of Social and Behavioral Sciences, The University of Arizona	Master of Science in Politics and Government , Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia (UPM)	Master of Philosophy, Regulation and Governance, The Australian National University	Magister Ilmu Pemerintahan, Fisip UNTAD
Pengembangan Keilmuan	Mengembangkan model baru dalam pendidikan hubungan masyarakat dengan mempromosikan penelitian, pengajaran, penjangkauan komunitas,	mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu secara menyeluruh dan terpadu di bidang Ekologi Manusia melalui pengajaran, penelitian,	Berorientasi pada pengkajian interdisipliner di bidang regulasi dan tata kelola pemerintahan, menggabungkan penelitian yang cermat dengan bentuk	Berorientasi pada pengelolaan tata kelola pemerintahan terkait fenomena kebencanaan baik ditimbulkan oleh alam maupun non alam yang menimbulkan dinamika sosial akibat perkembangan kondisi alam

<p>Kajian Capaian Pembelajaran</p>	<p>dan kewarganegaraan berkali-kali tinggi. Kepemimpinan masyarakat.</p> <p>dirancang bagi mereka yang bekerja di pemerintahan, organisasi nirlaba atau sektor korporasi di mana kerja sama dengan lembaga lain, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas menjadi tujuan yang penting. Mahasiswa dibentuk dan disiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dan mengelola kolaborasi lintas batas institusi pemerintahan dan sektoral di dunia yang semakin berjejaring.</p>	<p>profesi dan pengabdian kepada masyarakat bagi lulusan yang mengakui dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap Pencipta dan peran diri dalam kesejahteraan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>Bidang ini berfokus pada kemampuan analitis mahasiswa dalam penerapan teori dan model dalam politik dan pemerintahan, khususnya di bidang pemilu, perilaku dan budaya politik, hubungan etnis dan hubungan antar bangsa.</p>	<p>penerjemahan pengetahuan yang inovatif.</p> <p>Program ini membangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan manusia dan disampaikan oleh komunitas akademisi yang dinamis sebagai salah satu pusat akademik tata kelola dan peraturan paling dinamis di dunia.</p>	<p>sulteng yang rawan gempa. Likuifaksi dan tsunami serta fenomena alam lain termasuk dampak industri tambang. <i>Disaster smart governance</i> dengan pemanfaatan, internet of things (IoT) dan <i>big data</i> analisis dengan tidak melupakan local wisdom yang ada.</p> <p>Kurikulum Disaster Governance mampu melahirkan intelektual/ akademisi, aparatur/ praktisi dan konsultan ilmu pemerintahan yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk kebijakan yang adaptif dan win-win solution terhadap fenomena kebencanaan baik alam maupun non alam yang dihadapi sehingga dapat menginovasi perubahan yang ada. Pemerintahan berbasis Lingkungan dan Resiliensi Bencana serta kompetensi pengelolaan konflik dalam Perubahan Sosial Masyarakat industri baru yang dinamis. Prodi Magister Ilmu Pemerintahan ini akan fokus pada kajian tata kelola kebencanaan</p>
------------------------------------	---	--	---	---

2.3 Proses Penyusunan Kurikulum PS

Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian.

Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Universitas Tadulako memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai-nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya.

Perancangan kurikulum mempertimbangkan beberapa aspek yaitu visi misi Universitas, perkembangan *state of the art* bidang ilmu pemerintahan, analisis kebutuhan pengguna lulusan, *benchmarking*, kekhasan kajian, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan yang telah dilakukan oleh Magister Ilmu Pemerintahan. Tahun 2003 berdiri program studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Tadulako dengan salah satu kosentrasinya, pemerintahan daerah. Pembukaan kosentrasi pemerintahan daerah dilandasi oleh beberapa pertimbangan, diantaranya:

- a) Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berada di wilayah Sulawesi Tengah dapat memilih prodi MAP sebagai tempat melanjutkan studi S2;
- b) Empat puluh delapan persen (48 %) dosen Magister Administrasi Publik memiliki latar belakang keilmuan pemerintahan;
- c) Para birokrat yang berprofesi di instansi pemerintahan di wilayah Sulawesi Tengah dapat memilih MAP sebagai pilihan studi lanjut.

2. Tahun 2016 berdiri Program Doktor Ilmu Sosial, salah satu bidang kajian utama sebagai Konsentrasi pilihan yang dibuka adalah Ilmu Pemerintahan.

3. Tahun 2021 berdiri Program Magister Ilmu Komunikasi guna mewadahi lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi dan disiplin ilmu lainnya.

4. Kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE). Outcome-Based Education (OBE) adalah pendidikan yang berpusat pada outcome bukan hanya materi yang harus diselesaikan. OBE mengukur hasil pembelajaran (Outcome) dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan baru yang mempersiapkan mereka pada level global. *Outcome-Based Education* (OBE) adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan. Saat ini kecepatan pemanfaatan teknologi dan produksi inovasi berkembang sangatpesat sehingga memunculkan kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan SDM di dunia kerja dan masyarakat. Tantangan pendidikan abad 21 adalah peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di Perguruan Tinggi dengan dunia kerja dan dunia investasi (DUDI) serta kebutuhan

inovasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewartakan pendidikan abad 21 adalah *Outcome-Based Education* (OBE).

Menyikapi perkembangan di atas, maka dosen-dosen program studi ilmu pemerintahan menginisiasi mendirikan Magister Ilmu Pemerintahan guna merespon perkembangan program studi dalam lingkungan FISIP Untad. Dalam menyiapkan itu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinator program studi ilmu pemerintahan mengundang para dosen untuk menyelenggarakan rapat pembentukan Magister Ilmu Pemerintahan.
2. Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 september 2023 yang dihadiri 16 orang dosen. Hasil rapat menyepakati dibentuknya Magister Ilmu Pemerintahan dengan terlebih dahulu menyusun kurikulum S2 Ilmu Pemerintahan.
3. Koordinator program studi ilmu pemerintahan mengusulkan kepada dekan tim penyusun kurikulum Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Dekan FISIP Untad menerbitkan SK Tim Penyusun Kurikulum Magister Ilmu Pemerintahan sebagai persiapan pengusulan pembukaan program studi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. FGD pembentukan S2 Ilmu Pemerintahan yang melibatkan pemerintah daerah, alumni dan pimpinan Fisip Untad, Dosen dan Mahasiswa S1 Ilmu pemerintahan serta KAPSIPI (Kesatuan program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia).
6. Penyusunan Dokumen Pembentukan S2 Ilmu Pemerintahan dengan adanya rekomendasi Senat Fisip Untad, Senat akademik Untad, Rekomendasi dan persetujuan rektor dan LLDIKTI XVI Gorontalo dan pada akhirnya keluarnya Permendikbudristek tentang pendirian Prodi S2 Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Untad

III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

3.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976) Landasan filosofi pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Tadulako mengacu pada tiga nilai filosofi, yaitu Pancasila, kearifan lokal dan nilai yang terkandung dalam filsafat ilmu pemerintahan.

Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membawa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan nasional, kebijaksanaan dan keadilan. Artinya, kurikulum pendidikan tinggi yang dibuat harus membawa peserta didik agar memiliki sikap ketaatan kepada Tuhan-NYA, sikap humanisme dan menghormati hak asasi, memelihara keutuhan nasional, memiliki kebijaksanaan dan bersikap adil. Nilai-nilai Pancasila tersebut dijewantahkan kembali dalam sistem hukum nasional mulai dari UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2012, serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berlaku. Sistem hukum nasional inilah yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum.

Kedua, nilai kearifan lokal yang melandasi dalam penyusunan kurikulum prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad adalah nilai-nilai ke-Tadulako-an. Tadulako dalam konsep dan persepsi komunitas orang Kaili adalah "julukan atau personifikasi" bagi siapa saja yang berhasil pulang membawa kemenangan dalam perang. Tadulako juga, memiliki makna bagi mereka yang berhasil dalam tugas membela dan mempertahankan "kedaulatan" Kerajaan, dari serangan atau ancaman dari luar. Tadulako secara kongkrit berarti pemimpin memiliki sifat-sifat keutamaan (adil, bijaksana, jujur, cerdas, berani, bersemangat, pengayom, pembela kebenaran). Mengacu pada nilai ke-Tadulako-an itu, maka peserta didik pada program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebijaksanaan, kejujuran, kecerdasan, keberanian, semangat, mengayomi dan membela kebenaran.

Ketiga, filsafat ilmu pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan memiliki aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi adalah menyangkut pengkajian suatu ilmu pengetahuan dengan pembatasan lingkup penelaahannya. Epistemologi meliputi persoalan-persoalan bagaimana proses yang

memungkinkan diperolehnya pengetahuan? bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Sedangkan aksiologi menyangkut tujuan dan nilai penggunaan ilmu, dimana pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia (Suriasumantri, 2007).

Secara ontologi, ilmu pemerintahan mempelajari tentang negara, namun secara forma (kekhususan) mengkaji tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah, *governance* (tata kelola), hubungan antar lembaga-lembaga negara, fungsi pemerintah, aktivitas pemerintah dan gejala-gejala pemerintahan. Selanjutnya, epistemologis ilmu pemerintahan dipelajari melalui pendekatan ilmiah kualitatif dan kuantitatif atau menggabungkan keduanya. Dalam aspek kemanfaatan (aksiologi), kehadiran ilmu pemerintahan diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, serta menemukan dan mengembangkan teori-teori pemerintahan untuk memperkaya khasanah keilmuan.

Disamping nilai-nilai di atas, landasan penyusunan kurikulum ilmu pemerintahan juga mengacu pada beberapa filosofi, yakni filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Filosofi perenialisme, didasarkan pada aspek realisme, memiliki tujuan untuk mendidik mahasiswa agar menjadi pribadi yang rasional. Dalam aspek perenialisme, fokus kurikulumnya adalah penekanan pada matakuliah klasik dan analisis berbagai referensi atau literatur. Filosofi esensialisme, yang didasarkan pada aspek realisme dan idealisme, bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa dan mendidik mahasiswa agar menjadi orang yang kompeten.

Filosofi esensialisme menekankan pada keterampilan pokok *reading*, *writing*, dan aritmatika, serta matakuliah esensial. Filosofi progresivisme yang didasarkan pada aspek pragmatisme, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial demokratis yang memfokuskan kurikulum berdasarkan minat dan bakat mahasiswa, pengembangan kemampuan individu agar mampu melakukan pemecahan masalah. Filosofi rekonstruksionisme yang juga didasarkan pada aspek pragmatisme, memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Fokus dari filosofi ini adalah penekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset.

3.2 Landasan Sosiologis

Program pendidikan disusun dan dipengaruhi oleh nilai, masalah, kebutuhan, dan

tantangan dalam masyarakat. Karena itu kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Pengembangan kurikulum sebaiknya mengacu kepada aspek sosiologis dikarenakan peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat baik suatu sistem maupun subsistem berikutnya dapat memengaruhi proses pendidikan, oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat (Hamalik, 2008).

Pengembangan kurikulum prodi ilmu pemerintahan FISIP Untad mengacu pada aspek sosiologis masyarakat Sulawesi Tengah yang multi etnik, multi agama, dan multi budaya. Dalam konteks masyarakat yang beragam itu, maka kurikulum prodi ilmu pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang mampu memelihara stabilitas sosial, mewujudkan perdamaian dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Disamping itu, kondisi sosiologis masyarakat Sulawesi Tengah juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi terutama masuknya investasi asing di Sulawesi Tengah.

Pada kondisi itu, maka kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Ki Hadjar Dewantoro, menekan bahwa hakekat pendidikan, serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia mengadung tiga prinsip yaitu Kontinyu, Konvergen, serta Konsentris bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan terdapat tiga sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu: logika, estetika, dan etika. Logika adalah aspek pengetahuan dan penalaran, estetika berkaitan dengan aspek emosi atau perasaan, dan etika berkaitan dengan aspek nilai. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika (pikiran). Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam konteks inilah kurikulum program studi ilmu pemerintahan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat tersebut, tidak hanya pemenuhan dari

segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu program studi ilmu pemerintahan sebagai pembina dan pelaksana kurikulum melakukan evaluasi terhadap kurikulum guna mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada peserta didiknya relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua materi yang ada dalam kurikulum, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta pemangku kepentingan (*stake holder*) yang di sinkronisasikan dalam berbagai mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa, sehingga hasil belajar yang dicapai dapat lebih bermakna dalam kehidupan. Pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat, yang diwujudkan dengan menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran.

3.3 Landasan Historis

Pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk lebih mengenali sejarah masyarakat Sulawesi Tengah dari masa kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan hingga era reformasi. Penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Sulaeman Mamar, guru besar FISIP Untad menyebutkan Propinsi Sulawesi Tengah dahulu merupakan wilayah pemerintahan raja-raja, dan seiring dengan perkembangan masyarakat melalui proses migrasi, Sulawesi Tengah telah dihuni oleh beraneka macam suku bangsa seperti: Suku Bugis, Makassar, Mandar, Banjar, Minang, Jawa, Minahasa, Arab, India, Cina dan suku bangsa penduduk. Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 10 macam suku terasing yang menempati daerah pegunungan dan 12 suku bangsa asli yang bermukim di daerah daratan dan lembah. Ke 12 suku bangsa asli tersebut ialah: Kaili, Kulawi, Pamona, Mori, Tomini, Bungku, Toli-Toli, Buol, Balantak, Lore dan Saluan. Di antara suku-suku bangsa asli tersebut, Kaili merupakan suku bangsa yang terbesar jumlahnya asli (Mamar dkk, 1984).

Menurut sejarawan Universitas Tadulako, Haliadi Sadi (2017) memasuki abad 20 perkembangan Sulawesi Tengah mengalami transformasi dan terbentuk masyarakat baru. Dikisahkannya bahwa meski masih ada masyarakat tradisional yang menghuni gunung-gunung dan lembah, namun jumlahnya semakin berkurang seiring dengan sentuhan pembangunan dan migrasi penduduk baik secara alamiah maupun melalui proses transmigrasi. Dengan adanya transmigrasi masyarakat kota menuju ke desa-desa yang tersebar di pedalaman Sulawesi Tengah menjadikan daerah pedalaman

berubah sebagai *rural-metropolitan* yaitu desa yang menampakan wajah kehidupan masyarakat perkotaan. Di abad 21 perkembangan masyarakat Sulawesi Tengah mulai dipengaruhi oleh pertumbuhan kapitalisme. Dr. M. Nur Alamsyah, dosen FISIP Universitas Tadulako menggambarkan perubahan yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Morowali, pasca industrialisasi nikel. Digambarkannya bahwa penduduk desa di Morowali yang dahulunya bekerja sebagai petani dan nelayan mulai beralih pada masyarakat industri yang bekerja sebagai buruh pabrik nikel yang digerakan oleh investasi asing, khususnya Cina. Perubahan masyarakat ini menurut Nur Alamsyah (2021) tidak hanya mengubah wajah desa menjadi kota, namun juga telah menyebabkan kekumuhan seiring dengan kepadatan penduduk akibat migrasi sosial masyarakat dari luar Sulawesi Tengah.

Perjalanan sejarah dari masa ke masa sebagaimana tergambar dari perubahan sosial masyarakat Sulawesi Tengah yang dikisahkan oleh para sejarawan dan peneliti di atas, maka pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk memahami sejarah, belajar dari sejarah, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan zaman. Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

3.4 Landasan Psikologis

Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia/peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan.

Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan.

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan/program pendidikan, sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan dilandasi oleh asumsi - asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar.

Pengembangan kurikulum ilmu pemerintahan harus menumbuhkan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik peserta didik. Aspek kognitif adalah aspek yang mencakup kegiatan mental (otak). Aspek kognitif terkait dengan kemampuan intelektual atau kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Hasil belajar dalam aspek kognitif erat kaitannya dengan bertambahnya wawasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih baik setelah menempuh program pelatihan. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai (value). Istilah sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi, namun aspek paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Pendidikan afektif sangat penting, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu anak didik mampu dan mau mengamalkan pengetahuan yang diperoleh dari dunia pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek afektif terkait dengan kemauan seseorang dalam menerima dan mengamalkan nilai dan norma yang dipelajari.

Aspek, psikomotorik merupakan proses pengetahuan yang banyak didasarkan dari pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot dan membentuk terampilan. Dalam pengembangannya, pendidikan psikomotorik disamping proses menggerakkan otot, juga telah berkembang dengan pengetahuan yang berkaitan dengan terampilan hidup. Aspek psikomotorik sebagai hasil belajar berhubungan dengan keterampilan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Belajar akan membuat seseorang memiliki keterampilan dalam melakukan sesuatu tugas dan pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Aspek psikomotorik erat

kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik.

Kurikulum harus mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*) kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

3.5 Landasan Yuridis (Hukum)

Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam pengembangan kurikulum ilmu pemerintahan FISIP Untad:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- 8) Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, 2024.
- 9) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, 2024.
- 10) Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Tadulako Tahun 2024

IV. VISI KEILMUAN, MISI, TUJUAN, STRATEGI PS, DAN UNIVERSITY VALUE

4.1 Visi Keilmuan PS

Penyusunan kurikulum Magister Ilmu Pemerintahan mempertimbangkan Visi dan Misi Universitas Tadulako yaitu **Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional Dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup**. Dalam rangka memenuhi tuntutan dan perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan serta kebutuhan atas peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pemerintahan, baik dalam hal kapasitas akademik maupun praktik, maka Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dibentuk dengan Visi: **“Mewujudkan profesi keilmuan pemerintahan yang adaptif terhadap kebencanaan dan perubahan global berbasis lingkungan”**.

4.2 Misi PS

Penyusunan kurikulum Magister Ilmu Pemerintahan mempertimbangkan Visi dan Misi Universitas Tadulako yaitu Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional Dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup. Misi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad, yaitu meliputi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi dan pengembangan kompetensi bidang pemerintahan yang adaptif terhadap kebencanaan dan perubahan global;
2. Menyelenggarakan penelitian bidang ilmu pemerintahan dalam lingkup lokal, nasional dan global yang adaptif terhadap fenomena kebencanaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pemerintahan melalui jejaring kolaborasi dengan berbagai stake holder.

4.3 Tujuan PS

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam pengkajian ilmu pemerintahan dengan kemampuan menganalisis fenomena pemerintahan lokal, nasional dan global. , tata kelola kebencanaan dan perubahan global.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam praktek manajemen

pemerintahan dengan kemampuan memimpin dan mengelola berbagai bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang adaptif terhadap fenomena kebencanaan dan perubahan global.

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang penelitian pemerintahan, inovasi penyelenggaraan pemerintahan, advokasi dan pendampingan terkait persoalan-persoalan masyarakat terutama yang terkait dengan dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

4.4 Strategi PS

Perkembangan *State Of The Art* Bidang Ilmu Pemerintahan

- 1) Adanya perubahan paradigma dalam memandang pemerintahan yang semula

terbatas pada institusi atau lembaga-lembaga pemerintahan formal sebagaimana pada studi tentang *government*, kemudian bergeser menjadi studi tentang perilaku institusi, tata hubungan antarlembaga, bahkan pada sinergi antara pemerintah dengan aktor-aktor lain di luar pemerintah. Pergeseran paradigma inilah yang kemudian memunculkan wilayah kajian baru dalam Ilmu Pemerintahan, yakni *governance*.

- 2) Interaksi di antara institusi-institusi pemerintah maupun antara pemerintah dengan institusi non pemerintah, telah mendorong perubahan dalam obyek kajian Ilmu Pemerintahan maupun dalam Metodologi Ilmu Pemerintahan.

- 3) Dinamika pemerintahan yang berlangsung, termasuk karakteristik produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh internal/domestik negara akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi kekuasaan yang berlangsung pada lingkungan eksternal suatu negara, baik di tingkat global maupun internasional.

- 4) Perubahan sistem pemerintahan melalui sistem desentralisasi dan otonomi daerah telah menempatkan isu dan fenomena pemerintahan lokal menjadi strategis, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan lokal individu masyarakat dapat mempengaruhi dan terlibat langsung lebih banyak dibandingkan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan nasional yang lebih besar dan berada jauh dari masyarakat. Pemerintahan lokal terjadi dalam sebuah wilayah, kota dan negara. Jadi sangat mudah untuk menjangkau apa yang diamati dalam satu masyarakat dengan yang

dilakukan oleh komunitas publik yang lainnya ketika berinteraksi dengan pemerintahan.

5) Hasil Workshop dan Pengembangan Kurikulum berbasis outcome based education (OBE) yang dilakukan oleh Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Agustus 2023 di Unpad Trade Center Bandung telah menyepakati pemikiran baru tentang Ilmu Pemerintahan yaitu sebagai “Hubungan yang memerintah dengan yang di perintah dengan berbagai varian-varianya”.

6) Pengembangan konsep dan teori dalam Ilmu Pemerintahan untuk memecahkan masalah melalui pendekatan multidisipliner terkait proses pemerintahan lokal dan kebijakan publik dalam ruang lingkup hubungan yang memerintah dan yang diperintah dengan berbagai varian-varianya.

Analisis Kebutuhan Pasar

Analisis kebutuhan pasar dapat dilihat dalam dua hal; yaitu terkait dengan:

1) Potensi calon mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad. Program Studi magister Ilmu Pemerintahan memiliki potensi calon mahasiswa yang sangat besar, peluang untuk meraih minat calon mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan sangat terbuka luas, hal ini disebabkan karena saat ini banyak terdapat program studi sarjana Ilmu Pemerintahan di hampir semua Universitas, khususnya berdiri di kampus-kampus di wilayah Sulawesi seperti lulusan S-1 Ilmu Pemerintahan Untad, S-1 Ilmu Pemerintahan Unismuh Luwuk, S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Tompotika (Luwuk), S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Madako (Toli-Toli), S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo, S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, dan S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Manado). Selain itu juga potensi calon mahasiswa yang berasal dari birokrat, anggota legislatif, staff ahli DPRD yang bertugas di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, serta 3 Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yang berdekatan akses dengan Palu, yaitu Kabupaten Pasang Kayu, Mamuju Tengah dan Mamuju.

2) Potensi Lulusan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad berdasarkan analisis kebutuhan pasar. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan memiliki prospek yang bagus bagi para lulusannya untuk berkiprah di beberapa bidang pekerjaan atau profesi yang sangat dibutuhkan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Berdasarkan analisis

kebutuhan pasar, setidaknya peluang lulusan Magister Ilmu Pemerintahan dapat memenuhi bidang-bidang profesi sebagai berikut:

- a. Aparat Pemerintah: lulusan Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad akan sangat dibutuhkan dalam dunia pemerintahan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Keahlian yang melekat pada lulusan Magister Ilmu Pemerintahan diantaranya analisis kebijakan, mengatur jalannya/ penyelenggaraan pemerintahan, serta menyediakan solusi bagi permasalahan masyarakat.
- b. Anggota Legislatif Daerah (DPRD), calon mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan juga dapat diisi dari para anggota legislatif daerah (DPRD). Anggota dan Pengurus Partai Politik. Salah satu prospek kerja bagi lulusan Magister Ilmu Pemerintahan dengan menjadi anggota ataupun aktivis di Dalam suatu partai politik.
- c. Peneliti. Menjadi Peneliti dan asisten peneliti juga salah satu peluang prospek bagi lulusan Magister Ilmu pemerintahan.
- d. Aktivis LSM/ Organisasi Masyarakat. Lulusan Magister Ilmu Pemerintahan yang dibekali bagaimana menjadikan masyarakat menjadi ideal dengan suatu kebijakan yang efektif, dirasa tepat untuk mengisi LSM ataupun organisasi masyarakat secara aktif dan produktif. Produktivitas lulusan Magister Ilmu pemerintahan di dalamnya dapat membawa lulusan tersebut menjadiseorang aktivis.
- e. Konsultan Pemerintahan / Kebijakan. Menjadi konsultan pemerintahan, tentu sangat tepat bila menjadi prospek kerja yang menjanjikan bagi lulusan Ilmu pemerintahan. Karenanya menjadi konsultan sangat membutuhkan strategi – strategi dan pemikiran yang brilian untuk membangun pemerintahan yang baik, yang tentunya harus dilandasi dengan pengetahuan dan teori – teori mengenai pemerintahan. Maka dari itu, menjadi konsultan pemerintahan adalah salah satu prospek kerja yang paling diincar oleh para lulusan Ilmu Pemerintahan.
- f. Tenaga Pendidik/Akademisi/Dosen. Mempelajari dengan detail dan menyeluruh mengenai ilmu pemerintahan, tentu menjadikan lulusan Ilmu Pemerintahan sangat menguasai seluk beluk dunia pemerintahan baik dari segi teori maupun praktis. Dengan adanya kedalaman pengetahuan atas keilmuan yang dipelajari ini, menjadi dosen ataupun tenaga pendidik dalam bidang ilmu pemerintahan pun juga menjadi

prospek kerja dari lulusan Ilmu Pemerintahan. Melakukan transfer ilmu pada orang lain mengenai pemerintahan dan bertujuan untuk membangunnya secara bersama –sama.

4.5 University Value

Penyusunan kurikulum Magister Ilmu Pemerintahan mempertimbangkan Visi dan Misi Universitas Tadulako yaitu Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional Dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang di butuhkan dalam pembangunan masyarakat.
4. Menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional.

V. PROFIL LULUSAN DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI

5.1 Profil Lulusan PS.

Pola ilmiah pokok universitas tadulako adalah pada pengkajian lingkungan sebagai implikasi kondisi alam yang ada di Sulawesi tengah sebagai wilayah penyanggah paru-paru dunia dengan keberadaan hutan Lore Lindu dan beberapa kawasan lainnya. Kekayaan sumber daya alam dan potensi tersebut menempatkan visi untad sebagai satu kesatuan arah kelembagaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berstandar internasional dalam pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup. Perkembangan kondisi tersebut sangat relevan dengan visi pengembangan kelembagaan kajian ilmu pemerintahan yang harus dapat adaptif dengan kondisi yang dihadapainya sebagai konsekuensi dari perkembangan sosial kemasyarakatan yang ada.

Fenomena yang berkembang sebagai implikasi yang ditimbulkan dari pengelolaan lingkungan serta kondisi empirik yang membutuhkan kemampuan mengembangkan pengetahuan, memecahkan masalah teknologi terutama dalam tata kelola pemerintahan melalui praktik riset dan aktifitas inovatif. Kompetensi dan kapasitas tersebut diharapkan mampu membangun berbagai solusi terkait persoalan hubungan kelembagaan pemerintahan dengan komunitas lokal, entitas global yang menjadi investor dan vendor, hubungan dengan media, hubungan dengan pemerintah lain baik pada jenjang sama maupun berbeda, komunitas bisnis dan lainnya.

Kegamangan pemerintahan yang diperhadapkan atas kondisi tersebut yang sering mengalami berbagai hambatan dan kegagalan karena lemahnya tata kelola pemerintahan dan kompetensi profesional aparatur kelembagaan pemerintahan maupun pemangku kepentingan terkait untuk mampu melakukan penyesuaian terhadap kondisi terutama kebencanaan yang dihadapi masyarakat untuk mampu bertahan terhadap berbagai kondisi yang ada. Sekaiatn hal tersebut, capaian profil lulusan (CPL) magister ilmu pemerintahan Fisip Untad adalah sebagai berikut:

Table 1. Profil Lulusan (PL)

No	Profil	Deskripsi Kompetensi
1	Akademisi	Dosen pada perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang Ilmu Pemerintahan
2	Praktisi Birokrat dan Politik	Menjadi pemimpin partai politik, legislative, eksekutif, aparatur sipil negara, civil society, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.

3	Konsultan	Menjadi peneliti dan tenaga ahli di bidang Pemerintahan
---	-----------	---

5.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS

Table 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

No	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
1	CPL1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat dan bangsa berdasarkan pancasila.
2	CPL2	Mampu bekerjasama dan berperan sebagai warga negara yang tahu dan sadar dalam berkebangsaan, dengan menghargai kemajemukan.
3	CPL3	Berkemandirian, professional dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, adab dan taat hukum dalam tata kehidupan.
4	CPL4	Mampu bekerja mandiri, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, terukur dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Solusi dan gagasan dibidang pemerintahan.
5	CPL5	Mampu bertanggungjawab, berjejaring dengan baik, mengorganisir, mengkonstruksi tata kerja sistematis serta mampu mengambil Keputusan atas masalah pemerintahan yang dihadapi berdasarkan data dan perkembangan ilmu pengetahuan.
6	CPL6	Mampu bertanggung-jawab, mandiri, dapat memberikan arah, berintegritas ilmiah, memiliki solusi serta berkemampuan dalam mengoperasionalkan teori, konsep maupun perkembangan ilmu dan teknologi modern yang berkarakter kepemimpinan dalam mengevaluasi dinamika perubahan dan adaptif terhadap perkembangan.
7	CPL7	Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan negara secara terampil sesuai tatanan hukum dan tata Kelola yang baik, serta memiliki kompetensi teknis kebijakan dalam pemetaan masalah yang mengedepankan dinamika dan nilai-nilai keilmiahan maupun kearifan local Masyarakat.
8	CPL8	Mampu berbicara, berdiplomasi, berjejaring melahirkan ide, dan mewujudkan gagasan dalam merencanakan kepentingan berbasis data dan informasi dan kebutuhan Masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara-cara ilmiah.
9	CPL9	Mampu menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk Analisa keadaan local, regional, global penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki integritas, kapasitas pengendalian diri dalam menyelesaikan berbagai konflik serta memiliki kemampuan strategis didukung jejaring kerja dalam menyelesaikan masalah secara professional.

10	CPL10	Menguasai konsep dasar, teori social, politik, pemerintahan, negara, demokrasi, tata Kelola, birokrasi, sektor public, Sejarah pemerintahan, kepemiluan, kebencanaan, Masyarakat sipil dan lingkungan,
11	CPL11	Menguasai konsep dan praktik Hukum pemerintahan, implikasi dan dinamika pemerintahan, local, nasional dan global, fenomena kebudayaan, strategi dan metode keilmuan dan metodologi pemerintahan, civil society, perencanaan dan Pembangunan, metode penelitian, <i>internet of things</i> , big data.
12	CPL12	Menguasai Konsep, teori dan praktik politik, kebijakan, tata Kelola keuangan, sumber daya pemerintahan, monitoring dan evaluasi, pemberdayaan, manajemen kebencanaan, pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, demokrasi, kepemiluan, kewenangan, hukum pemerintahan, hubungan antar kelembagaan pemerintahan dan teknologi pemerintahan serta pengelolaan konflik.

5.3 Matriks Hubungan CPL dan Profil Lulusan (PL)

Table 3. Hubungan CPL dan PL

Kode	Rumusan CPL	PL1	PL2	PL3
CPL 01	Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat dan bangsa berdasarkan pancasila.	√	√	√
CPL 02	Mampu bekerjasama dan berperan sebagai warga negara yang tahu dan sadar dalam berkebangsaan, dengan menghargai kemajemukan.	√	√	√
CPL 03	Berkemandirian, professional dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, adab dan taat hukum dalam tata kehidupan.	√	√	√
CPL 04	Mampu bekerja mandiri, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, terukur dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Solusi dan gagasan dibidang pemerintahan.	√	√	√
CPL 05	Mampu bertanggungjawab, berjejaring dengan baik, mengorganisir, mengkonstruksi tata kerja sistematis serta mampu mengambil Keputusan atas masalah pemerintahan yang dihadapi berdasarkan data dan perkembangan ilmu pengetahuan.	√	√	√
CPL 06	Mampu bertanggung-jawab, mandiri, dapat memberikan arah, berintegritas ilmiah, memiliki solusi serta berkemampuan dalam mengoperasionalkan teori, konsep maupun perkembangan ilmu dan teknologi modern yang berkarakter kepemimpinan dalam mengevaluasi dinamika perubahan dan adaptif terhadap perkembangan.	√	√	√
CPL 07	Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan negara secara terampil sesuai tatanan hukum dan tata Kelola yang baik, serta	√	√	√

	memiliki kompetensi teknis kebijakan dalam pemetaan masalah yang mengedepankan dinamika dan nilai-nilai keilmiah maupun kearifan local Masyarakat.			
CPL 08	Mampu berbicara, berdiplomasi, berjejaring melahirkan ide, dan mewujudkan gagasan dalam merencanakan kepentingan berbasis data dan informasi dan kebutuhan Masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara-cara ilmiah.	√	√	√
CPL 09	Mampu menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk Analisa keadaan local, regional, global penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki integritas, kapasitas pengendalian diri dalam menyelesaikan berbagai konflik serta memiliki kemampuan strategis didukung jejaring kerja dalam menyelesaikan masalah secara professional.	√	√	√
CPL 10	Menguasai Teori, konsep dasar pemerintahan, filosofi, metodologi dan implikasi dan dinamika pemerintahan, local, nasional dan global, fenomena kebudayaan.	√	√	√
CPL 11	Menguasai konsep dasar, teori pemerintahan, negara, demokrasi, tata Kelola, birokrasi, sektor public, Sejarah pemerintahan, dan dinamika perkembangannya dalam kehidupan masyarakat.	√	√	√
CPL 12	Menguasai dan mampu mengoperasionalkan teori, konsep dan pengembangan ilmu pemerintahan dalam praktik pemerintahan, politik, kebijakan, tata Kelola pemerintahan, teknologi pemerintahan, tata kelola pelayanan, manajemen kebencanaan, , demokrasi, pemilihan, konstitusi pemerintahan, hubungan antar kelembagaan pemerintahan serta pengelolaan konflik.	√	√	√

(Berikan tanda √ pada setiap PL berdasarkan rumusan CPL yang mendukung/menopang PL tsb. Cermati Panduan!

VI. PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program studi. Salah satu untuk dapat merumuskan capaian pembelajaran terlebih dahulu harus dirumuskan kekhasan program studi. Selain itu, rumusan kekhasan kajian yang dikembangkan program studi dapat menjadi kekuatan dan keunggulan program studi. Berdasarkan perkembangan *state of the art* bidang Ilmu Pemerintahan dan rumusan kurikulum yang dikembangkan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad, maka dirumuskan kekhasan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad yaitu pada “**Disaster Governance (Tata Kelola Kedaruratan Bencana)**”.

6.1 Body of Knowledge (BoK)

Tata kelola risiko yang bersifat konvensional sudah tidak sesuai dan perlu dihasilkan dari konteks lokal untuk mewakili karakteristik sosial-budaya dan/atau berbasis tempat untuk mengatasi risiko bencana yang lebih sistemik. Diperlukan kerangka tata kelola risiko yang baru. Berdasarkan informasi dan inspirasi dari literatur yang berkembang tentang topik risiko sistemik dalam studi bencana dan bidang lainnya, kurikulum ini dikembangkan dengan beberapa elemen penting untuk menghasilkan kerangka Tata Kelola Risiko Sistemik (SRG) yang dikontekstualisasikan untuk kasus Indonesia guna mengeksplorasi bagaimana risiko sistemik dan interaksinya dengan risiko residual dan masalah lain yang ada dapat dikelola, dan bagaimana mekanisme kelembagaan lokal dapat disesuaikan untuk menangani kompleksitas lanskap risiko tersebut. Untuk itu makan bidang kajian Prodi Magister ilmu pemerintahan di fokuskan kepada:

- 1) Metodologi Ilmu Pemerintahan
- 2) Tata Kelola Pemerintahan
- 3) Teknologi dan Informasi Pemerintahan
- 4) Politik Pemerintahan

Tabel 5. Bahan Kajian (BK) Berdasarkan CPL PS

Kode	Rumusan CPL	Bahan Kajian (BK)
CPL 01	Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat dan bangsa berdasarkan Pancasila.	1; 2; 3; 4
CPL 02	Mampu bekerjasama dan berperan sebagai warga negara yang tahu dan sadar dalam berkebangsaan, dengan menghargai kemajemukan.	1; 2;
CPL 03	Berkemandirian, profesional dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, adab dan taat hukum dalam tata kehidupan.	1; 2; 3; 4
CPL 04	Mampu bekerja mandiri, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, terukur dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Solusi dan gagasan dibidang pemerintahan.	1; 2; 3; 4
CPL 05	Mampu bertanggungjawab, berjejaring dengan baik, mengorganisir, mengkonstruksi tata kerja sistematis serta mampu mengambil Keputusan atas masalah pemerintahan yang dihadapi berdasarkan data dan perkembangan ilmu pengetahuan.	2; 3; 4
CPL 06	Mampu bertanggung-jawab, mandiri, dapat memberikan arah, berintegritas ilmiah, memiliki solusi serta berkemampuan dalam mengoperasionalkan teori, konsep maupun perkembangan ilmu dan teknologi modern yang berkarakter kepemimpinan dalam mengevaluasi dinamika perubahan dan adaptif terhadap perkembangan.	1; 2; 3; 4
CPL 07	Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan negara secara terampil sesuai tatanan hukum dan tata Kelola yang baik, serta memiliki kompetensi teknis kebijakan dalam pemetaan masalah yang mengedepankan dinamika dan nilai-nilai keilmiah maupun kearifan local Masyarakat.	2; 3; 4
CPL 08	Mampu berbicara, berdiplomasi, berjejaring melahirkan ide, dan mewujudkan gagasan dalam merencanakan kepentingan berbasis data dan informasi dan kebutuhan Masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara-cara ilmiah.	1; 2; 4
CPL 09	Mampu menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk Analisa keadaan local, regional, global penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki integritas, kapasitas pengendalian diri dalam menyelesaikan berbagai konflik serta memiliki kemampuan strategis didukung jejaring kerja dalam menyelesaikan masalah secara profesional.	2; 3; 4

CPL 10	Menguasai Teori, konsep dasar pemerintahan, filosofi, metodologi dan implikasi dan dinamika pemerintahan, local, nasional dan global, fenomena kebudayaan.	1; 2; 3; 4
CPL 11	Menguasai konsep dasar, teori pemerintahan, negara, demokrasi, tata Kelola, birokrasi, sektor public, Sejarah pemerintahan, dan dinamika perkembangannya dalam kehidupan masyarakat.	1; 2; 3; 4
CPL 12	Menguasai dan mampu mengoperasionalkan teori, konsep dan pengembangan ilmu pemerintahan dalam praktik pemerintahan, politik, kebijakan, tata Kelola pemerintahan, teknologi pemerintahan, tata kelola pelayanan, manajemen kebencanaan, demokrasi, kepemiluan, konstitusi pemerintahan, hubungan antar kelembagaan pemerintahan serta pengelolaan konflik.	1; 2; 3; 4

6.2 Deskripsi Bahan Kajian

Tabel 6. Bahan Kajian (BK)

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
BK1	Metodologi Ilmu Pemerintahan	memberikan gambaran mengenai hakikat ilmu terutama ilmu pemerintahan terkait sumber pembentuknya, cara mengetahuinya dan penerapannya. Kajian ini menjelaskan ilmu pemerintahan baik secara filosofis maupun historis, menjelaskan kebenaran ilmiah dan metodologinya, menjelaskan pemerintahan sebagai sistem sosial, sistem kekuasaan serta peristiwa atau gejala pemerintahan.
BK2	Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Pengelolaan kekuasaan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi yang efektif dan efisien sesuai Tata kelola yang baik sesuai hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pemerintah melalui jalan demokrasi yang menciptakan akuntabilitas pemerintahan yang baik melalui berbagai teori, konsep, pendekatan, teknik dan strategi.
BK3	Teknologi dan Informasi Pemerintahan	Penguasaan dan pemahaman konsep, instrumen pendukung pengelolaan pemerintahan untuk peningkatan efisiensi dalam berbagai aktifitas pemerintahan pada berbagai lembaga dan pelayanan pemerintahan.
BK4	Politik Pemerintahan	Penguasaan dalam memahami politik kelembagaan formal politik pemerintahan, gerakan sosial dan aktor Non-negara, dan dinamika kontemporer.

Tabel 8. Daftar Mata Kuliah, CPL, BK, dan Materi Pembelajaran

(Kode Mata Kuliah mengacu pada Ketentuan Perguruan Tinggi). Cermati Pedoman dan Peraturan Akademik UNTAD!

No	Kode MK	Nama MK	Butir CPL yang Dibebankan pada MK	Deskripsi Mata Kuliah/ Materi Pembelajaran	Estimasi Waktu (Jam)		Bobot SKS
					Teori	Praktek	
1.	B0824200 1	Filsafat & Metode Ilmu Pemerintahan		Deskripsi MK: Mata kuliah filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan adalah mata kuliah yang membahas secara rinci terkait filsafat, ilmu, pengetahuan serta pemerintahan sebagai sebuah ilmu dan kebenaran ilmiah dari Ilmu pemerintahan. Materi Pembelajaran:	2,15	0	
				Estimasi Waktu (Jam)	137	16	
				Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)			
2.	B0824200 2	Metodologi Ilmu pemerintahan		Deskripsi MK: Memberikan pengetahuan tentang berbagai pendekatan dalam studi ilmu pemerintahan, kekuatan dan kelemahan, metode penelitian dan keterampilan menyusun perencanaan penelitian khususnya penelitian dalam lingkup kajian ilmu pemerintahan. Secara khusus mahasiswa akan diberi keterampilan menguasai teknik merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian, menyusun kerangka teoritis untuk menjelaskan masalah yang diteliti, memilih metode dan merancang penelitian lapangan serta menyusun analisis dan membuat laporan penelitian. Materi Pembelajaran:			
				Estimasi Waktu (Jam)	137	16	
				Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)			
3.	B0824200 3	Teori-Teori Sosial		Deskripsi MK: Memberikan penguasaan dan pemahaman mendalam tentang landasan teori-teori sosial klasik dan kontemporer, mengali perspektif multidisipliner dalam ilmu sosial, serta kemampuan analisis kritis yang diperlukan untuk menerapkan teori-teori ini dalam konteks penelitian dan analisis sosial yang kompleks. Materi Pembelajaran:			
				Estimasi Waktu (Jam)	137	16	
				Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)			

4.	4	Teori-Teori Ilmu Pemerintahan		Deskripsi MK: Memberikan pemahaman mendalam tentang teori-teori yang mendasari pemerintahan, administrasi publik, politik, serta memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis kritis, pemecahan masalah, dan pengembangan kebijakan di berbagai konteks pemerintahan.				
				Materi Pembelajaran:				
				Estimasi Waktu (Jam)				137
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)							3	
5.	5	Ekonomi Politik		Deskripsi MK: Memberikan penguasaan interaksi kompleks antara aspek ekonomi dan politik pada negara dalam konteks tatanan domestik dan internasional. Tujuannya untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi dan keputusan politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, stabilitas sosial, serta hubungan antar negara.				
				Materi Pembelajaran:				
				Estimasi Waktu (Jam)				137
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)							3	
6.	6	Konstitusi Pemerintahan		Deskripsi MK:				
				Memberikan pemahaman terkait konsep fundamental atau aturan dasar suatu negara sebagai Aturan dasar yang menjadi acuan untuk menciptakan aturan-aturan hukum lain yang di bawahnya sebagai kerangka penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan..				
				Materi Pembelajaran:				
Estimasi Waktu (Jam)							137	16
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)							3	
7.	7	Seminar Pemerintahan		Deskripsi MK: Inovasi mahasiswa dalam melakukan pembacaan dan analisis atas perkembangan kontemporer pemerintahan.				
				Materi Pembelajaran:				

		Estimasi Waktu (Jam)		90	16		
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)						2	
8.	B0824200 8	Demokrasi dan Pemerintahan		<p>Deskripsi MK: Membahas mengenai konsep negara demokrasi dalam sebuah negara, konsep negara, dan implikasinya dalam tata kelola negara, sistem politik, politik lokal, pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum dan terminasi hukum terhadap politik, perkembangan konsep HAM, dan HAM dalam hukum positif oleh pemerintah secara global dan di Indonesia</p> <p>Materi Pembelajaran:</p>			
				Estimasi Waktu (Jam)	137	16	
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)						3	
9.	B0824200 9	Etika & Moral Pemerintahan		<p>Deskripsi MK: Memberikan pemahaman tentang pengertian, konsep-konsep etika dan moral pemerintahan, sumber-sumber etika, serta tanggung jawab pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi-fungsinya baik fungsi regulasi, fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan, sertamembahas bentuk-bentuk penyimpangan etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Materi Pembelajaran:</p>			
				Estimasi Waktu (Jam)	137	16	
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)						3	
10.	B0824201 0	Tata Kelola Sektor Publik		<p>Deskripsi MK: mempelajari tentang penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam hal restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan evaluasi program, hingga tercapainya tujuan yang ditetapkan.</p> <p>Materi Pembelajaran:</p>			
				Estimasi Waktu (Jam)	137	16	
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)						3	

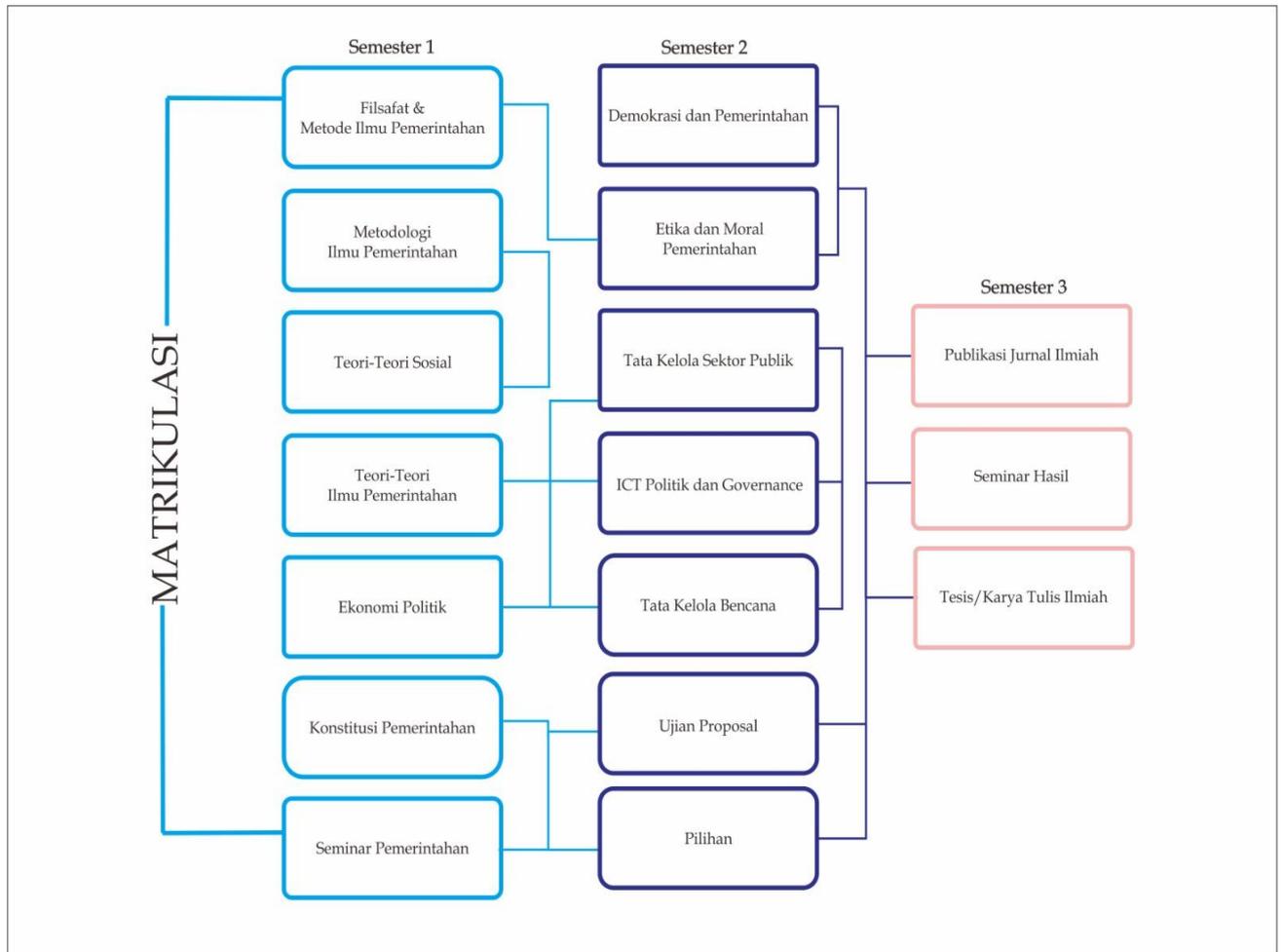
11. 1	B0824201	ICT Politic & Governance		<p>Deskripsi MK: Memberikan pemahaman konsep dan teori digital dalam kehidupan politik dan pemerintahan beserta penguasaan keterampilan dan kapabilitas mahasiswa membahas konteks politik dan pemerintahan yang melatarbelakangi berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi digital Government, termasuk mengenai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi pemerintahan serta dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan.</p> <p>Materi Pembelajaran:</p>			
					Estimasi Waktu (Jam)	137	16
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)							3
12. 2	B0824201	Tata Kelola Bencana		<p>Deskripsi MK: Memberikan pemahaman dan konsepsi serta pendekatan strategis dan teknis terkait prinsip-prinsip dasar dan pendekatan terkait manajemen bencana meliputi Mitigasi, penanganan dan rekonstruksi. Studi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam merencanakan, merespons, dan mengelola bencana alam dan bencana terkait manusia. Studi ini juga akan mempersiapkan mahasiswa untuk dapat berperan dalam merancang kebijakan dan strategi, serta berkontribusi pada upaya kemanusiaan dalam penanganan bencana.</p> <p>Materi Pembelajaran:</p>			
					Estimasi Waktu (Jam)	137	16
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)							3
13. 3	B0824201	Ujian Proposal		<p>Deskripsi MK: Proses penulisan rencana penulisan karya ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa dengan tujuan agar penelitian dalam rangka penulisan tesis dapat dilakukan secara cermat, tepat, konsisten dan sesuai kaidah penelitian/penulisan hukum, sehingga</p>			

				kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan			
				Materi Pembelajaran:			
				Estimasi Waktu (Jam)	90	16	
				Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)			2
14.	B082420	Pilihan		Deskripsi MK:			
				Materi Pembelajaran:			
				Estimasi Waktu (Jam)	137	16	
				Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)			3
15.	B0824201	Publikasi Jurnal	8	Deskripsi MK: Proses penulisan ilmiah meliputi penguasaan masalah, konsep dan metode serta ditemukannya temuan baru atas fenomena kemasyarakatan yang sedang menjadi obyek penelitian.			
				Materi Pembelajaran:			
				Estimasi Waktu (Jam)	182	16	
				Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)			4
16.	B0824201	Seminar Hasil	9	Deskripsi MK: Tahapan pengkajian ilmiah melalui serangkaian proses ilmiah untuk adanya penguasaan terkait konsep/teori, metode dan obyek yang sedang diteliti dan posisinya dalam kajian yang telah ada.			
				Materi Pembelajaran:			
				Estimasi Waktu (Jam)	182	16	
				Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)			4

17.0	B0824202	Thesis/ Karya Tulis akhir		Deskripsi MK: Pengajuan thesis yang merupakan hasil telaah atas fenomena pemerintahan yang dijadikan obyek penelitian serta berbagai bentuk karya tulis seperti prototype, pertunjukkan, dan lain-lain. Materi Pembelajaran:			
				Estimasi Waktu (Jam)	272	16	
Beban Belajar 1 SKS setara dengan 45 Jam/Semester (2.81 Jam/1SKS/Pertemuan)							6
Total Jumlah SKS (untuk Program Profesi Minimal 36 SKS, Magister berada pada Rentang 52-72 SKS, Doktoral diatur PT)							54

IX. DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH SETIAP SEMESTER

Gambar. Sebaran Mata Kuliah/ Semeseter



Tabel 10. Daftar MK di Semester I

Semester I						
No.	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum*	Praktik**	Jumlah
1.	B08242001	Filsafat & Metode Ilmu Pemerintahan	2	0	1	3
2.	B08242002	Metodologi Ilmu pemerintahan	3	0	0	3
3.	B08242003	Teori-Teori Sosial	3	0	0	3
4.	B08242004	Teori-Teori Ilmu Pemerintahan	3	0	0	3
5.	B08242005	Ekonomi Politik	2	0	1	3
6.	B08242006	Konstitusi Pemerintahan	2	0	1	3
7.	B08242007	Seminar Pemerintahan	2	0	0	2
Jumlah Beban Studi Semester I						20

Tabel 11. Daftar MK di Semester II

Semester II						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum*	Praktik**	Jumlah
1.	B08242008	Demokrasi dan Pemerintahan	2	0	1	3
2.	B08242009	Etika & Moral Pemerintahan	2	0	1	3
3.	B08242010	Tata Kelola Sektor Publik	2	0	1	3
4.	B08242011	ICT Politik & Governance	2	0	1	3
5.	B08242012	Tata Kelola Bencana	2	0	1	3
6.	B08242013	Ujian proposal	2	0	0	2
7.	B08242014- B08242017	Pilihan	2	0	1	3
Jumlah Beban Studi Semester II						20

Tabel 12. Daftar MK di Semester III

Semester I						
No.	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum*	Praktik**	Jumlah
1.	B08242018	Publikasi Jurnal	2	0	2	4
2.	B08242019	Seminar Ilmiah	2	0	2	4
3.	B08242020	Thesis/ Karya Tulis akhir	2	0	4	6
Jumlah Beban Studi Semester III						14

*Praktikum mengacu pada pembelajaran MK di Laboratorium/Studio

**Praktik mengacu pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan (satuan pendidikan, instansi, perusahaan, industri, atau dunia usaha yang relevan)

X. MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Modalitas belajar merupakan cara seseorang dalam menyerap informasi melalui indra yang dimilikinya sebagai cara tercepat bagi otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Berdasarkan hal tersebut untuk memupuk efektifitas pencapaian kualitas pembelajaran, maka dilakukan pemanfaatan model belajar bagi peserta yang tepat untuk mendorong keberhasilan proses pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan mengembangkjan ketiga modalitas pada setiap peserta terkait visual, auditorial dan kinestetik. Stragei optimalisasi modalitas belajar tersebut yang akan berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam rencana pembelajaran mata Kuliah berpusat pada mahasiswa dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang digunakan adalah memfasilitasi mahasiswa belajar melalui moda luring (*offline*), daring (*online*), dan bauran/*hybrid (blended learning)*. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan normal maka pembelajaran dilakukan melalui moda luring/tata muka (*offline*) lebih dominan sesuai ketentuan diatas 70% sesuai kedaan yang dihadapi.

XI. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

(Tuliskan semua Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah PS yang dilengkapi dengan rencana tugas, rancangan penilaian dan evaluasi, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/ atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain yang diperlukan). Cermati Panduan Penyusunan RPS UNTAD!

		UNIVERSITAS TADULAKO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN			Nomor Dokumen
		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)			
Pengesahan	No. Revisi	Jumlah Hal	Tanggal Penyusunan		
Mata Kuliah (MK) : Metodologi Ilmu pemerintahan	Kode Mata Kuliah B08242002	Rumpun Mata Kuliah	BOBOT (SKS) 3 (Tiga)	Semester 1 (satu)	
Program Studi: S2 Magister Ilmu Pemerintahan		Dosen Pengampu/Penanggung Jawab: Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP.,M.Si		Koordinator PS	
Matakuliah Prasyarat		:			
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL ... : CPL ... : CPL ... : CPL... :				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK 1 : CPMK 2 : CPMK 3 : CPMK 4 : CPMK ... :				
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Sub CPMK 1 : Sub CPMK 2 : Sub CPMK 3 :				

		Sub CPMK 4 : Sub CPMK 5 : Sub CPMK ... :																																																																																			
Peta Capaian Pembelajaran		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CPL</th> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="6">Sub CPMK</th> <th rowspan="2">Persentasi (%)</th> </tr> <tr> <th>Sub-CPMK 1</th> <th>Sub-CPMK 2</th> <th>Sub-CPMK 3</th> <th>Sub-CPMK 4</th> <th>Sub-CPMK 5</th> <th>Sub-CPMK 6</th> <th>Sub-CPMK ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPL 2</td> <td>CPMK 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL 4</td> <td>CPMK 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL 6</td> <td>CPMK 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL 10</td> <td>CPMK 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL ...</td> <td>CPMK ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Persentasi (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>								CPL	CPMK	Sub CPMK						Persentasi (%)	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6	Sub-CPMK ...	CPL 2	CPMK 1									CPL 4	CPMK 2									CPL 6	CPMK 3									CPL 10	CPMK 4									CPL ...	CPMK ...									Persentasi (%)									100
CPL	CPMK	Sub CPMK						Persentasi (%)																																																																													
		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6		Sub-CPMK ...																																																																												
CPL 2	CPMK 1																																																																																				
CPL 4	CPMK 2																																																																																				
CPL 6	CPMK 3																																																																																				
CPL 10	CPMK 4																																																																																				
CPL ...	CPMK ...																																																																																				
Persentasi (%)									100																																																																												
Deskripsi Mata Kuliah																																																																																				
Materi Pembelajaran (MP)		MP 1 : MP 2 : MP 3 : MP 4 : MP ... :																																																																																			
Referensi/Pustaka		Utama: 1. 2. Pendukung: 3. 4.																																																																																			
Perte- muan Ke-	Kemampuan yang Diharapkan (SUB-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran		Bobot Pen																																																																													
(1)	(2)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (5)		Daring (6)		(9)	(10)																																																																												
1		(3)	(4)																																																																																		

Bobot Penilaian

- (1) Bobot Case Method:
- (2) Bobot Proyek:
- (3) Partisipasi dalam kelas/forum LMS:
- (4) UTS atau UAS :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah..... Program Studi Fakultas telah diverifikasi oleh Ketua Jurusan/ Ketua ProgramStudi.

Mengetahui
Ketua Program Studi/Ketua Jurusan

Palu,.....
Dosen Pengampu/
Penanggung Jawab MK

.....NIP:

.....NIP:

TATA CARA PENGISIAN KOLOM RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No	Komponen	Penjelasan Pengisian
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<ul style="list-style-type: none"> o Rumusan kompetensi untuk mendukung terbentuknya profil lulusan, diperoleh dalam dokumen kurikulum PS. o CPL terdiri dari kesatuan ranah sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan yang dibebankan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) o Capaian Pembelajaran Lulusan diisi sesuai dengan CPL yang terkait dengan matakuliah yang sudah ada dalam matrik hubungan CPL dengan Bahan Kajian Mata Kuliah dalam kurikulum Program Studi masing-masing.
2	Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)	<ul style="list-style-type: none"> o Capaian Pembelajaran Mata Kuliah adalah kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah yang bersangkutan sesuai dengan bahan kajian yang telah dirumuskan. o CPMK bersifat spesifik terhadap mata kuliah yg dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
3	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	<ul style="list-style-type: none"> o Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills) untuk setiap pokok bahasan o Kemampuan akhir yang akan dicapai setelah menyelesaikan bahan kajian tertentu. Kemampuan akhir-akhir ini kalau semuanya dicapai akan mendukung pencapaian CPMK/kompetensi mata kuliah)
4	Peta Capaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> o Menggambarkan hubungan antara CPL, CPMK, dan Sub CPMK. o Memberikan gambaran persentasi bobot penilaian dari CPL, CPMK, dan Sub CPMK.
5	Deskripsi Matakuliah	<ul style="list-style-type: none"> o Deskripsi mata kuliah sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. o Deskripsi mata kuliah dibuat dalam bentuk narasi yang menguraikan mengenai konten (isi) mata kuliah dan garis besar strategi dominan yang ditempuh: misalnya mata kuliah ini disajikan secara teori dan praktek menggunakan Case Method (CM) dan/atau Team Based Project (TBP).
6	Pertemuan ke	<ul style="list-style-type: none"> o Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (Satu semester) bisa 1/2/3/4 mingguan).
7	Indikator Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> o Indikator ditulis di sini terdiri dari KATA KERJA OPERASIONAL dan REFERENS (KONTEN) o Berisi indikator yang dapat menunjukkan unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif, misal ketepatan

No	Komponen	Penjelasan Pengisian
		<p>analisis, kerapian sajian, kreativitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif :banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan, dll).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 SUB-CPMK bisa terdiri dari 1 atau lebih indikator ○ Indikator harus diukur dengan menggunakan penilaian yang sesuai yang disertai dengan bukti-bukti.
8	Kriteria dan Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memberikan gambaran kriteria penilaian untuk setiap indikator. ○ Kriteria penilaian merupakan patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. ○ Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten atau tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. ○ Memberikan gambaran bentuk penilaian untuk setiap indikator. ○ Bentuk penilaian bisa berupa tes atau non tes.
9	Bentuk Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bisa dipilih bentuk pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10	Metode Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ○ Metode yang dipilih, adalah yang melibatkan mahasiswa secara intensif; Small Group Discussion (SGD), Role-Play & Simulation Learning (RPL), Discovery Learning (DL), Self-Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CL), Collaborative Learning (CbL), Project-Based Learning (PjBL), Problem Based Learning and Inquiry (PBL), dan metode lainnya yang setara. ○ Untuk mendukung IKU, maka gunakan case method dan/atau Team-Based Project sebagai bagian bobot evaluasi.
11	Estimasi Waktu	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tulis rancangan waktu yang dialokasikan untuk mencapai kemampuan akhir yang terkait. (Takaran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan SKS (Satuan Kredit Semester). Satu SKS setara dengan 45 jam per semester)
12	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bisa diisi pokok bahasan/sub pokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia bahan ajar/diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan).
13	Bobot Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> ○ Disesuaikan dengan <u>Kedalaman</u> dan <u>Keluasan</u> bahan kajian. ○ Secara sederhana tercermin dari waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan.

No	Komponen	Penjelasan Pengisian
		o Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak diberi bobot, tetapi diberi bobot ketika menentukan nilai akhir kelulusan dalam suatu matakuliah.

LAMPIRAN:

A. CONTOH LEMBAR PENILAIAN PRODUK

NO	Deskripsi Aspek yang Dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Format Produk (Sistematika penulisan)				
2	Keaslian gagasan				
3	Kejujuran dan sportifitas penulisan, menyajikan referensi				
4	Kejelasan pengungkapan permasalahan				
5	Pemaparan deskripsi terungkap dengan jelas				
6	Keterkaitan antara judul, permasalahan, pembahasan dan kesimpulan				
7	Media berkaitan dengan hal yang dijelaskan Menyajikan gambar/tabel untuk memperjelas pembahasan				
8	Menyajikan simpulan				
Dst				
	Skor Rerata				

Yang Menilai

(.....)

RUBRIK PENSKORAN PENILAIAN PRODUK

Skor	Aspek yang Dinilai
4	Jika aspek ini dirumuskan sesuai dengan uraian deskripsi pada kolom uraian aspek yang diamati pada lembar pengamatan
3	Jika aspek ini dirumuskan sebagian besar seperti uraian pada deskripsi aspek yang diamati, tetapi ada sebagian kecil yang tidak memenuhi kriteria
2	Jika aspek ini dirumuskan hanya sebagian kecil memenuhi kriteria pada deskripsi aspek, sebagian besar tidak memenuhi
1	Aspek ini dirumuskan sama sekali berbeda dengan deskripsi yang ditentukan

B.CONTOH LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI

JUDUL MAKALAH			
NAMA KELOMPOK PENYAJI			
NIM/NAMA ANGGOTA PENYAJI	1		
	2		
	3		

FASE	ASPEK	SKOR			
Pendahuluan	1. Menyampaikan tujuan dari presentasi	4	3	2	1
	2. Menghubungkan topik dengan pengetahuan lain yang relevan	4	3	2	1
Kegiatan Inti	3. Signifikansi [Kesesuaian/kebermaknaan topik yang dibahas]	4	3	2	1
	4. Pemahaman [Pemahaman terhadap hakikat dan ruang lingkup masalah yang disajikan]	4	3	2	1

FASE	ASPEK	SKOR			
	5. Argumentasi [Alasan yang diberikan terkait permasalahan yang dibicarakan]	4	3	2	1
	6. Resposifness [Kesesuaian jawaban yang diberikan dengan pertanyaan yang muncul]	4	3	2	1
	7. Penampilan [Rasa percaya diri dalam mempresentasikan makalahnya]	4	3	2	1
	8. Penyajian [Menyajikan materi secara sistematis dan runtut]	4	3	2	1
Penutup	9. Memberikan Rangkuman/kesimpulan	4	3	2	1
	10. Memberikan Penguatan	4	3	2	1
11. Kemenarikan presentasi		4	3	2	1
12. Kerjasama		4	3	2	1
Skor Rerata					

Yang Menilai

(_____)

RUBRIK PENSKORAN PENILAIAN PRESENTASI

Skor	Aspek yang Dinilai
4	Jika aspek ini dirumuskan sesuai dengan uraian deskripsi pada kolom uraian aspek yang diamati pada lembar pengamatan
3	Jika aspek ini dirumuskan sebagian besar seperti uraian pada deskripsi aspek yang diamati, tetapi ada sebagian kecil yang tidak memenuhi kriteria
2	Jika aspek ini dirumuskan hanya sebagian kecil memenuhi kriteria pada deskripsi aspek, sebagian besar tidak memenuhi
1	Aspek ini dirumuskan sama sekali berbeda dengan deskripsi yang ditentukan

C. FORMAT PENILAIAN CASE METHOD (Kualitas Partisipasi Diskusi)

No.	Nama Mahasiswa	NIM	ASPEK YANG DINILAI																				Jumlah Skor
			Kualitas Ide					Kualitas Argumen					Menghargai Pendapat					Kerja Sama					
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1	Agung Pratama	A24119091																					
2	Alna Natasya	A24119100																					
3	Andika Prasetya	A24119024																					
4	Anisa Istiqoma	A24119010																					
5																							

No.	Nama Mahasiswa	NIM	ASPEK YANG DINILAI																				Jumlah Skor
			Kualitas Ide					Kualitas Argumen					Menghargai Pendapat					Kerja Sama					
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
6																							
..																							

Yang Menilai

(_____)

Contoh Rubrik Penilaian Case Method

1. Kualitas Ide:
 - 0=tidak ada ide
 - 1=ide tidak sesuai
 - 2=ide sesuai tidak mengarah ke solusi
 - 3=ide sesuai dan mengarah ke solusi
 - 4=ide sesuai solusi
2. Kualitas komunikasi
 - 0=tidak memberikan argumentasi
 - 1=komunikasi tidak jelas
 - 2=komunikasi disampaikan dengan santun tetapi kurang jelas
 - 3=komunikasi disampaikan dengan jelas dan santun
 - 4= komunikasi disampaikan dengan santun dan jelas mudah dipahami
3. Menghargai pendapat: Indikator: 1) Mendengarkan pendapat orang lain yang sedang bicara, 2) Tidak memotong pembicaraan oranglain, 3) Menerima pendapat orang lain dengan lapang dada, 4) mengoreksi pendapat orang lain dengan santun.
 - 0=tidak ada satupun indikator yang muncul
 - 1= ada satu indikator yang muncul
 - 2= ada dua indikator yang muncul
 - 3= ada tiga indikator yang muncul
 - 4= semua indikator muncul
4. Kerjasama
 - 0=tidak hadir dalam kelompok
 - 1=ikut hadir dalam kelompok
 - 2=hadir dan kurang berpartisipasi
 - 3=hadir dan aktif memberi solusi
 - 4=Hadir dan aktif memberikan ide/Solusi

D. CONTOH RUBRIK PENILAIAN PRODUK

Contoh Penilaian Proyek berupa Visual/video

Nama :
 Stb.
 Program Studi

No	DESKRIPSI ASPEK YANG DINILAI	4	3	2	1
1.	Komunikatif (sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan keinginan sasaran)				
2.	Kreatif dalam ide berikut penguangan gagasan				
3.	Sederhana dan memikat				
4.	Audio (narasi, sound effect, backsound, musik)				
5.	Visual (layout design, typography, warna)				

Sesuai dengan pesan dan santun
dalam penyampaian

Tidak Sesuai Pesan/sulit dipahami

sesuai pesan dengan penyampaian
apa adanya

sesuai pesan dengan penyampaian
kurang santun

Contoh Rancangan Tugas 01

	UNIVERSITAS TADULAKO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN			
RENCANA TUGAS MAHASISWA				
Mata Kuliah			
Kode	SKS	...	Semester
Dosen Pengampu			
Metode Penugasan				
Cased Method/Team Based Project				
Judul Tugas				
Tugas ... :				
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah				
Sub-CPMK ... :				
DESKRIPSI TUGAS				
<ul style="list-style-type: none"> • Tugas ke ... Uraikan tugas yang diberikan 				
METODE Pengerjaan Tugas				
<ul style="list-style-type: none"> • (sesuaikan dengan tugas yang diberikan), misalnya: Soal/permasalahan diselesaikandengan tahapan analisa, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi/cek jawaban , atau lainnya. 				
BENTUK DAN FORMAT LUARAN				
<ul style="list-style-type: none"> • (sesuaikan dengan tugas yang diberikan), misalnya: Penyelesaian soal/permasalahan, makalah, poster atau dan lainnya. 				
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN				
<ul style="list-style-type: none"> • Bobot tugas (...%) (sesuaikan dengan RPS) • Kriteria (sesuaikan dengan Tugas yang diberikan), Misalnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian langkah penyelesaian soal/permasalahan : analisa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi/cek jawaban b. Kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran jawaban tiap langkah pemecahan 				
JADWALPELAKSANAAN				
Waktu Penyelesaian Tugas: (sesuaikan dengan Tugas yang diberikan dan sks). Misalnya:1 minggu				
LAIN-LAIN				
(sesuaikan dengan tugas yang diberikan). Misalnya: Ketepatan waktu pengumpulantugas dan kecurangan/menjiplak menjadi faktor diikutsertakan dalam penilaian.				
DAFTAR RUJUKAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuliskan Rujukan yang digunakan 2. Sebaiknya mengintegrasikan dengan hasil penelitian dan/atau pengabdian kepada Masyarakat dosen pengampu 3. Sebaiknya up-to-date 				

Contoh Rancangan Tugas 02

MATA KULIAH :

SEMESTER : sks :

MINGGU KE : Tugas ke :

1. TUJUAN TUGAS :

.....

2. URAIAN TUGAS :

a. Obyek garapan :

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan :

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan :

3. KRITERIA PENILAIAN :

a. %

b. %

c. %

PENJELASAN FORMAT TUGAS :

1. TUJUAN TUGAS :

adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil menajejkan tugas ini (hard skill dan soft skill)

2. URAIAN TUGAS :

a. Obyek garapan : berisi deskripsi obyek material yang akan distudi dalam tugas ini (misal tentang penyakit kulit/ manajemen RS/ narkoba/ bayi/ perawatan darurat/ dll)

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :

uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus distudi, tingkat ketajaman dan kedalaman studi yang distandarkan. (misal tentang perawatan bayiprematur, distudi tentang hal yang perlu diperhatikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi - kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur ,dll) Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/ seminar.

c. Metode/ cara pengerjaan tugas :

berupa petunjuk tentang teori /teknik / alat yang sebaiknya digunakan, alternatif langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/ individual.

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan :

adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint).

3. KRITERIA PENILAIAN :

berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan.

XII. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

12. 1. Dokumen Legal Pembentukan Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu

Manual mutu Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Tadulako (UNTAD) terintegrasi dalam bentuk dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri atas:

1. Pernyataan Mutu

Seluruh Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako Berkomitmen untuk Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas.

2. Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu Program Studi Magister Ilmu pemerintahan Universitas Tadulako dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako, yaitu “Universitas Tadulako Menyediakan Pelayanan Akademik dan Non-Akademik yang Bermutu untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan”.

Rincian Kebijakan SPMI

- a Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya;
- b Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi;
- c Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan *riset laboratorium* dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*);
- d Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang non-akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan;
- e Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non-akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi UNTAD menjadi unggul, mandiri dan berkarakter;
- f Peningkatan SPMI didasarkan pada enam sasaran strategis kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Tadulako 2020-2024, yaitu:
 - 1) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa UNTAD;

- 2) Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya di UNTAD;
- 3) Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan;
- 4) Menguatnya kapasitas inovasi;
- 5) Meningkatnya kualitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi; dan Terwujudnya tata kelola yang baik

3. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu

Pelaksana penjaminan mutu di level institusi UNTAD adalah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) yang bertanggung jawab kepada Rektor, dan pada tingkat fakultas dan pascasarjana adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Dekan/Direktur/Koordinator Program Studi. Keberadaan LPPMP pada level universitas dan UPM pada level fakultas/ pascasarjana secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan pembentukan kelembagaan yang mendasari tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu yang diembannya tingkat universitas, fakultas, dan pascasarjana berdasarkan SK Rektor UNTAD No. 97/UN28/KP/2017. Sedangkan Unit pelaksana penjaminan mutu berdasarkan keputusan pembentukan, dan keaktifannya di tingkat fakultas yang merupakan operasionalisasi OTK baru sesuai permendikbudristek No 41 tahun 2023.

4. Standar Mutu

Standar mutu dirumuskan dan dikendalikan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako, maka semua unit kerja menggunakan standar tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik. Standar mutu dikembangkan dalam upaya pencapaian visi dan misi universitas, sehingga mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik dapat terukur. Penyusunan standar mutu dimulai sejak tahun 2012 dengan terbitnya 18 dokumen mutu.

5. Prosedur Mutu

Kegiatan sistem penjaminan mutu internal dilengkapi dengan Prosedur Instruksi Kerja, dan Formulir. Pemilik dokumen tersebut adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, UPT, Pusat, Jurusan, Program Studi, dan Unit di Rektorat.

12.2. Ketersediaan Dokumen Mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;

Ketentuan Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem

penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Terkait hal itu UNTAD telah menerbitkan 4 (empat) buku dokumen SPMI Universitas Tadulako. Dokumen tersebut adalah:

- (1) Buku 1. Kebijakan SPMI Universitas Tadulako;
- (2) Buku 2. Manual SPMI Universitas Tadulako;
- (3) Buku 3. Standar SPMI Universitas Tadulako; dan
- (4) Buku 4. Formulir SPMI Universitas Tadulako.

Keempat buku tersebut disusun berdasarkan SK Rektor Nomor 5989/UN28/KP/2022 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Tadulako tahun 2022 tertanggal 26 September 2022. Selanjutnya, *draft* dilokakaryakan pada akhir tahun 2022 dengan mendatangkan tenaga ahli dari Direktorat Penjaminan Mutu. Hasil lokakarya ditetapkan dengan SK Rektor Nomor 7418/UN28/AK/2022 tanggal 4 Januari 2022 Tentang Penetapan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako, setelah melalui persetujuan senat akademik Universitas Tadulako

Jenis Dokumen	Uraian
<i>Kebijakan SPMI</i>	Visi, misi dan tujuan; latar belakang, luas lingkup; daftar dan definisi; garis besar kebijakan SPMI; informasi tentang dokumen SPMI lain; dan hubungan dokumen kebijakan dengan dokumen lainnya.
<i>Manual SPMI</i>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Manual Penetapan Standar SPMI (2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI (3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI (4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI (5) Manual Peningkatan Standar SPMI
<i>Standar SPMI</i>	
1. Standar Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kompetensi Lulusan (2) Isi Pembelajaran (3) Proses Pembelajaran (4) Penilaian Pembelajaran (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan (6) Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	<p>(7) Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>(8) Pembiayaan Pembelajaran</p>
2. Standar Penelitian	<p>(9) Standar Hasil Penelitian</p> <p>(10) Standar Isi Penelitian</p> <p>(11) Standar Proses Penelitian</p> <p>(12) Standar Penilaian Penelitian</p> <p>(13) Standar Peneliti</p> <p>(14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>(15) Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>(16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	<p>(17) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(18) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(19) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(20) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(21) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(23) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
4. Standar Tambahan di Luar SNPT (akademik dan non akademik)	<p>(25) Standar Visi Misi</p> <p>(26) Standar Identitas</p> <p>(27) Standar Kemahasiswaan</p> <p>(28) Standar Suasana Akademik</p> <p>(29) Standar Kerjasama</p> <p>(30) Standar Sistem Informasi</p>
<i>Formulir SPMI</i>	<p>Berbagai macam maupun jumlah formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar Dikti sesuai peruntukan setiap standar Dikti.</p>

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNTAD sebanyak 42 standar, yang dikelompokkan menjadi standar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar nasional pendidikan; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi (non SNDikti) yang terdiri dari 18 standar yaitu: standar visi, misi, dan tujuan; standar tata kelola, kepemimpinan, tata pamong dan penjaminan mutu, standar kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar; standar suasana akademik, standar sistem informasi; standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar program studi, standar pemuatkhiran data PD-DIKTI, standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, standar akreditasi program studi, standar pembukaan program studi baru, standar tracer study, standar pengelolaan lingkungan kampus, dan standar internasionalisasi kampus. .

(3). Terlaksananya Siklus Penjaminan Mutu (siklus PPEPP)

Implementasi SPMI Universitas Tadulako mengikuti pola P-P-E-P-P sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) , yang terdiri dari lima komponen pokok, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, serta Peningkatan, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar. Implementasi Siklus PPEPP SPMI Universitas Tadulako

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI Universitas Tadulako untuk

setiap standar Universitas Tadulako dapat dilihat pada Gambar 1 di atas. Implementasi model PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu Universitas Tadulako tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Universitas Tadulako Penetapan standar Universitas Tadulako merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tadulako yang secara utuh membentuk SPMI Universitas Tadulako. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar Universitas Tadulako, tetapi mulai dari tahap perumusan standar Universitas Tadulako. Perumusan standar Universitas Tadulako dapat dilakukan oleh tim ad hoc yang diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan/atau Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar Universitas Tadulako dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di Universitas Tadulako.
2. Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako Universitas Tadulako menjalankan setiap standar Universitas Tadulako yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar Universitas Tadulako tersebut dapat 17 dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar Universitas Tadulako adalah audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar Universitas Tadulako. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar Universitas Tadulako. Subjek dapat berupa pemimpin perguruan tinggi (Rektor), Dekan dan Direktur Pascasarjana, ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Pusat, Ketua PSDKU, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa. Sekalipun audience telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh audience.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, Universitas Tadulako dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap standar Universitas Tadulako dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar Universitas Tadulako dapat berbentuk: 1). Diagnostic evaluation, yaitu

evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 2). *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar; 3). *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi. Di dalam manajemen SPMI Universitas Tadulako, evaluasi dan pengendalian (*control*) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi standar Universitas Tadulako dilakukan oleh empat pihak yang memiliki 18 tujuan peningkatan standar yaitu: 1. Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh audience dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan audience. 2. *Monitoring dan Evaluasi (Monev)*, dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas dilaksanakan. 3. *Audit Internal*, evaluasi internal yang dilakukan oleh Pusat Audit EPMP LPPMP Universitas Tadulako, yaitu suatu unit yang ada di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Mutu (LPPMP) Universitas Tadulako. 4. *Akreditasi*, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Tadulako, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

4. *Pengendalian Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako* Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan

langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar Universitas Tadulako. Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar Universitas Tadulako. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah audience dari 19 standar Universitas Tadulako dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Peningkatan Standar Universitas Tadulako Pelaksanaan standar Universitas Tadulako adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar Universitas Tadulako dalam SPMI, atau Kaizen atau continuous quality improvement. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar Universitas Tadulako telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah standar Universitas Tadulako dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu Universitas Tadulako tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan.

5. Peningkatan standar Universitas Tadulako juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Tadulako. Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen standar, Universitas Tadulako dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Universitas Tadulako. Untuk itu, siklus SPMI Universitas Tadulako dimulai kembali dengan tahap penetapan standar Universitas Tadulako, yang berarti menetapkan standar Universitas Tadulako baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya. Dengan menjalankan proses ini (PPEPP) telah tercapai satu kondisi penyempurnaan mutu secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*) pada beberapa unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako.

XIII. TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM

Tata cara penerimaan mahasiswa baru di Prodi Ilmu Pemerintahan terdiri atas penerimaan melalui jalur; SBMPTN, SMMPTN. jumlah SKS yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa di setiap semester bervariasi yaitu semester I adalah 20 sks, semester II 20 sks dan semester III 14 SKS sehingga total secara keseluruhan adalah 54 SKS. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah sesuai kondisi pada PS Ilmu pemerintahan Untad adalah sistem daring dan luring serta hybrid. Di Magister PS ilmu pemerintahan menggunakan penerimaan melalui mekanisme untuk pertama kalinya bersifat *affirmatif* dibuka namun selanjutnya akan dibuka sesuai ketentuan penerimaan umum di atas. Selain itu ke masa depan sesuai kebijakan pimpinan, PS S2 IP akan dapat menerima mahasiswa baru melalui mekanisme jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau/RPL).

XIV. PENUTUP

Kurikulum ini mewujudkan adanya penyesuaian kebutuhan pengguna lulusan dan kebijakan Kampus Merdeka- Merdeka Belajar, maka Magister Ilmu Pemerintahan menyusun kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). OBE dirancang untuk membantu peserta didik mencapai hasil yang telah ditentukan (*outcome targeted*). Pendekatan OBE ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif dan efektif. OBE mempengaruhi proses pembelajaran mulai dari rancangan kurikulum, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, bentuk evaluasi serta lingkungan pembelajaran. Kurikulum OBE ini selain sebagai sarana analisis untuk membentuk mata kuliah baru dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan sebagai evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah yang sudah ada dengan acuan capaian pembelajaran prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengelolaan kurikulum OBE perlu didukung menggunakan sistem agar evaluasi capaian pembelajaran pada kurikulum dapat dilakukan dengan mudah.

Komponen penting kurikulum OBE di Indonesia berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dalam

penyusunannya harus saling terkait satu komponen dengan komponen yang lainnya. Komponen Profil Lulusan mesti diturunkan ke dalam bentuk kemampuan akhir yang ingin dicapai yang disebut dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Komponen CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) adalah turunan dari CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah program studi sedangkan Sub-CPMK adalah turunan langsung dari CPMK dalam bentuk yang lebih spesifik. Tahapan Pertemuan mata kuliah yang disusun oleh dosen di dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester) mata kuliah mesti terhubung secara langsung dengan komponen Sub-CPMK. Program studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Untad, dalam melakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan *Outcomes Based Education* (OBE).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : Manual. **1460**/E1/HK.03.00/2024 18 Juli 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 456/E/O/2024

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Plt. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 3. Rektor Institut Keuangan-Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, di Jakarta;
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di DKI Jakarta; dan
 5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 456/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister pada Universitas Tadulako di Kota Palu, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,


Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 456/E/O/2024

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM
MAGISTER PADA UNIVERSITAS TADULAKO DI KOTA PALU

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pembukaan program studi pada perguruan tinggi, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi yang divalidasi dan disetujui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu jaminan yang cukup mendasar untuk menentukan kelayakan dan mutu penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi kontribusi konkret untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi, diantaranya berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Tadulako Nomor 14179/UN28/AK.01.00/2023 tanggal 14 November 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 0028/LL16/KL.00.00/2024 tanggal 5 Januari 2024, dan hasil validasi terhadap persyaratan minimum akreditasi pembukaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister pada Universitas Tadulako, menunjukkan telah terpenuhinya persyaratan minimum akreditasi sehingga perlu diberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister pada Universitas Tadulako di Kota Palu;
 - c. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk dan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister pada Universitas Tadulako di Kota Palu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister pada Universitas Tadulako di Kota Palu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS TADULAKO DI KOTA PALU.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister pada Universitas Tadulako di Kota Palu.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Tadulako di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Tadulako bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Tadulako di Kota Palu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001



1. PENDAHULUAN

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18